

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

**FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor: 500.1/886/Kpls/Per-UU/2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 72);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 500.1/733/Kpts/Per-UU/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:
- a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan Tahun 2025; dan
 - b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 November 2024

 Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
3. Yth. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor; dan
- 6 Yth. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 500.1/886/Kpts/Per-UU/2024

TANGGAL : 11 November 2024

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA*) KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan meliputi 416 desa dan 19 kelurahan dengan total penduduk di tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor sebanyak 5.627.021 jiwa. Secara geografis terletak di bagian Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 106°01'- 107°103' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 6°18'-6°47' Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, Kabupaten Bogor memiliki luas 299.177,85 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah hujan 2.500-5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur yang memiliki curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 21,1°C-33,7°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 26,3°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Perekonomian Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan pergeseran ke arah perbaikan yang signifikan. Di tahun 2023, berdasarkan Kabupaten Bogor dalam Angka 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Bogor meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp267.743,69 triliun menjadi Rp289.106,15 triliun di tahun 2023. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor, perbaikan ekonomi Kabupaten Bogor di tahun 2023 juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,19% dan tahun sebelumnya sebesar 5,25%.

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi mengenai ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka perlindungan dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Atlas* (FIA) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan diharapkan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan wilayah desa/kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten Bogor pada tahun 2024.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana intervensi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten Bogor akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan Dan Gizi

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

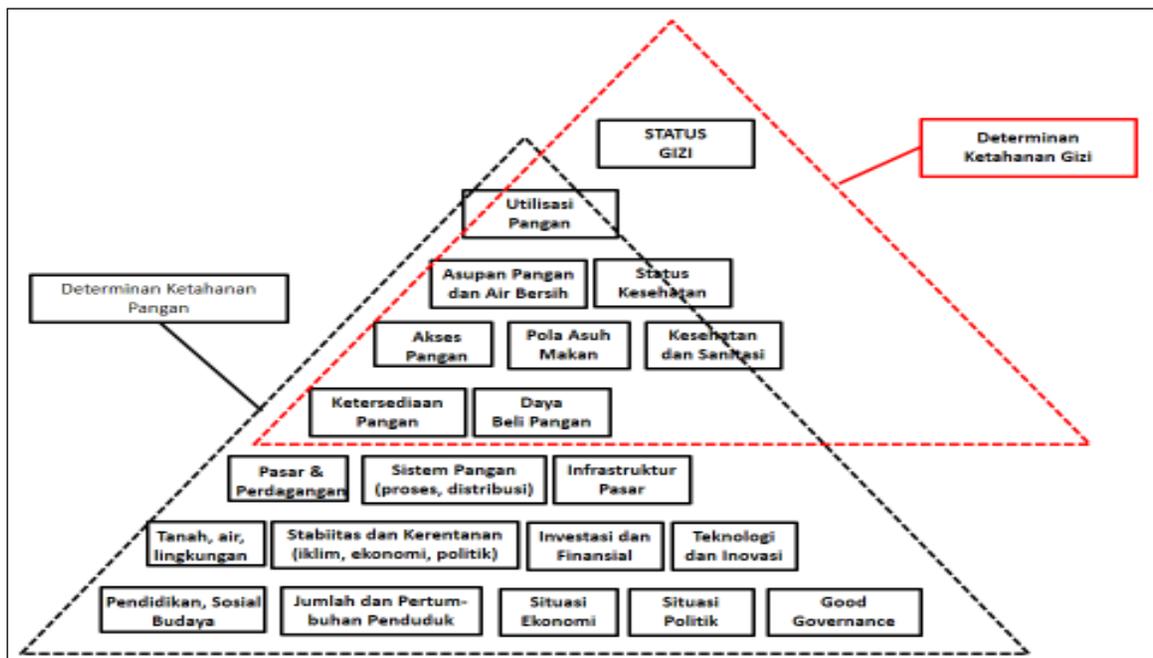
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh Undang-undang Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh UNICEF pada awal tahun 1990-an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan *higiene* yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1).

Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan, desa/kelurahan dan tingkat masyarakat.

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi.

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi *mikronutrien*, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan lain-lain. Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3 Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam 3 (tiga) kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

1.3.1 Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat Kabupaten Bogor. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten Bogor didasarkan pada:

- a. hasil *review* terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya;

- b. tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
- c. keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan
- d. ketersediaan data pada seluruh desa/kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten Bogor Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator FSVA Kabupaten Bogor tahun 2024

Indikator	Definisi
A. Aspek Ketersediaan Pangan	
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dan lain-lain) dibandingkan jumlah rumah tangga
B. Aspek Keterjangkauan Pangan	
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dibandingkan jumlah penduduk
Desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	Desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Dapat dilalui roda 4 sepanjang tahun; (2) Dapat dilalui roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dan lain-lain); (3) Dapat dilalui roda 4 selama musim kemarau; (4) Tidak dapat dilalui roda 4 sepanjang tahun.
C. Aspek Pemanfaatan Pangan	
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas : 1) Dokter umum/spesialis; 2) Dokter gigi; 3) Bidan; 4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa/kelurahan

1.3.2 Metode Analisis

1. Ketersediaan Data FSVA 2024

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten Bogor Tahun 2024 menggunakan 9 jenis data sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Data penyusunan FSVA tahun 2024 Kabupaten Bogor

No	Jenis data	Sumber data	Keterangan
1	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Luas lahan Pertanian tahun 2023 (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor)	-
2	Luas Wilayah (Ha)	RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor)	-
3	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan	Potensi desa (Podes) 2021 (BPS Kabupaten Bogor)	Tahun 2023 tidak tersedia data <i>Updating Podes</i>
4	Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 Tahun 2023 disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dinas Sosial Kabupaten Bogor)	-
5	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	Podes 2021 (BPS Kabupaten Bogor yang diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor)	Tahun 2023 tidak tersedia data <i>Updating Podes</i>
6	Jumlah Rumah Tangga (RT) dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung	Data jumlah RT yang mendapatkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terhadap RT di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor)	-
7	Jumlah tenaga kesehatan (Dokter umum/spesialis; Dokter gigi; Bidan; dan Tenaga kesehatan lainnya)	Data Sumber Daya Manusia pada Puskesmas Tahun 2023 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor)	-
8	Jumlah Penduduk	Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor	-
9.	Jumlah Rumah Tangga	Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Disdukcapil Kabupaten Bogor)	-

Ada beberapa catatan terkait data yang digunakan dalam penyusunan peta FSVA Kabupaten Bogor tahun 2024, sebagai berikut:

1. Data jumlah RT dengan sumber air minum tidak terlindung bersumber dari data target dikurangi dengan data realisasi yang telah mendapatkan pelayanan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023, dengan catatan untuk desa yang jumlah realisasinya melebihi target, maka data jumlah RT dengan sumber air minum tidak terlindungnya dijustifikasi bernilai 0 (nol);
2. Data luas lahan pertanian tahun 2023 yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, meliputi luas lahan sawah, lahan pekarangan, lahan kebun/tegalan dan kolam; dan
3. Data jumlah tenaga kesehatan yang digunakan merupakan tenaga kesehatan yang berada di setiap Puskesmas dengan/kelurahan justifikasi dengan cara jumlah tenaga kesehatan setiap desa/kelurahan yang berada pada 1 (satu) wilayah kerja Puskesmas memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sama dengan jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut.

2. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategori mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS. Desa/kelurahan pada masing-masing indikator individu dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* (kecuali indikator desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai yang dikelompokkan dalam 4 kelompok prioritas). *Base line cut off point* indikator individu pada FSVA Kabupaten Bogor Tahun 2024 menggunakan *cut off point* FSVA Kabupaten Bogor tahun 2019, kecuali indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk yang menggunakan *cut off point* FSVA Kabupaten Bogor tahun 2021.

3. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100);
- b. Menghitung skor komposit desa/kelurahan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada desa/kelurahan ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, besaran bobot masing-masing indikator disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Bobot indikator individu

No	Indikator	Bobot
1	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6
2	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan terhadap jumlah RT	1/6
Sub Total		1/3
3	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	1/6
4	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah RT tanpa akses air bersih terhadap jumlah RT	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 (enam) kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil *penjumlahan* dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

K_j : *Cut off point* komposit ke-J

A_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan berdasarkan *cut off point* komposit ke dalam 6 (enam) prioritas, pada 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kelompok rentan rawan pangan yang terdiri dari Prioritas 1 (rentan rawan pangan tinggi), Prioritas 2 (rentan rawan pangan sedang) dan Prioritas 3 (rentan rawan pangan rendah); dan
2. Kelompok tahan pangan yang terdiri dari Prioritas 4 (tahan pangan rendah), Prioritas 5 (tahan pangan sedang) dan Prioritas 6 (tahan pangan tinggi).

Berdasarkan hal tersebut, wilayah yang masuk ke dalam kelompok Prioritas 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok Prioritas 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

1.3.3 Pemetaan

Hasil analisis komposit kemudian divisualisasikan ke dalam peta. Selain itu, indikator individu juga akan divisualisasikan ke dalam bentuk peta berdasarkan *range* indikatornya, sehingga akan dihasilkan tujuh peta yang terdiri dari satu peta komposit dan enam peta indikator individu.

Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi, semakin tua gradasi warna merahnya menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan, gradasi warna hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah (ketahanan pangan tinggi), semakin tua gradasi warna hijaunya menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan pangannya.

Untuk proses pemetaan Pemetaan dilakukan dengan menggunakan *software Quantum-Gis*.

BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

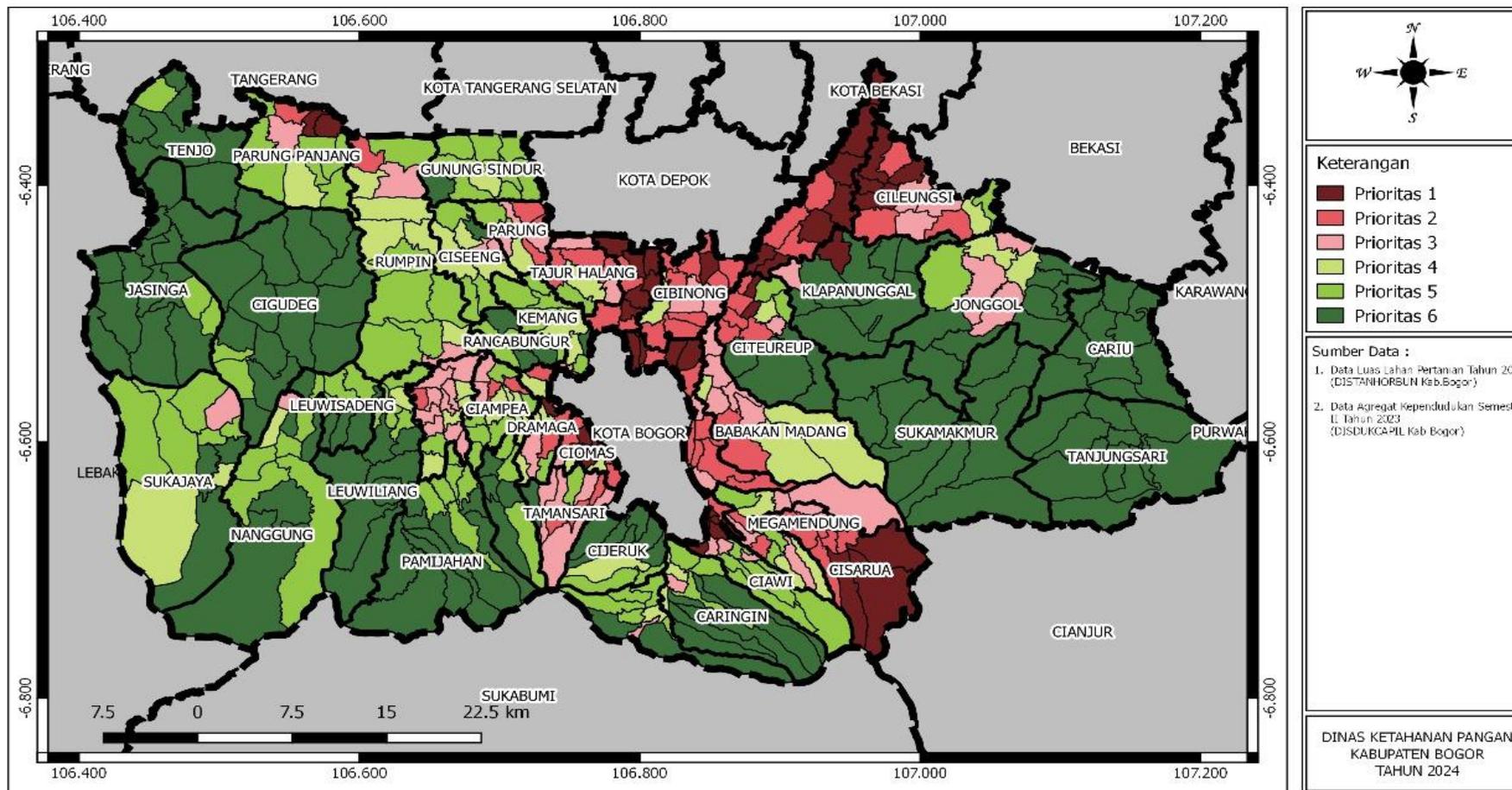
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, RT dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke RT. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Dalam analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, untuk aspek ketersediaan pangan diwakilkan oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan
2. Indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata indeks ketersediaan pangan untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 11,27 *point* dan rata-rata indeks ketersediaan pangan untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 18,02 *point*.



Gambar 2 Peta rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bogor

2.1 Indikator Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dalam melakukan analisis indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan data di tingkat desa sebagai berikut:

- a. Data Luas Lahan Pertanian yang digunakan bersumber dari Distanhorbun Kabupaten Bogor Tahun 2023, meliputi luas lahan sawah, pekarangan, tegalan/kebun dan kolam; dan
- b. Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2023 (Sumber Disdukcapil Kabupaten Bogor).

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2023, rata-rata skor rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 14,36 *point* dan rata-rata skor rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk untuk desa-desa yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 25,57 *point*.

Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Bogor untuk setiap prioritas disajikan pada tabel 4. Sedangkan, persentase skala prioritas pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk disajikan pada gambar 3.

Tabel 4 Sebaran desa/kelurahan pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan skala prioritas

No	Prioritas	Range Rasio lahan pertanian	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Total
1	Prioritas 1	$\leq 0,0005$	34	4	38
2	Prioritas 2	0,0005 – 0,0036	11	49	60
3	Prioritas 3	0,0036 – 0,0083	2	56	58
4	Prioritas 4	0,0083 – 0,0135	1	46	47
5	Prioritas 5	0,0135 – 0,0228	1	96	97
6	Prioritas 6	$> 0,0228$	0	135	135

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.



Gambar 3 Persentase sebaran desa/kelurahan pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan skala prioritas

Dari 416 desa, sebanyak 34 desa (8,2%) masuk prioritas 1, sebanyak 49 desa (11,8%) masuk prioritas 2, sebanyak 56 desa (13,5%) masuk prioritas 3, sebanyak 46 desa (11,1%) masuk prioritas 4, sebanyak 96 desa (23,1%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 135 desa (32,5%) masuk prioritas 6.

Dari 19 kelurahan, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 1, sebanyak 11 kelurahan (57,9%) masuk prioritas 2, sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 3, sebanyak 1 kelurahan (5,3%) masuk prioritas 4, sebanyak 1 kelurahan (5,3%) masuk prioritas 5 dan tidak ada kelurahan yang masuk dalam prioritas 6.

Rata-rata rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah 0,0272 dimana rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk terbaik adalah sebesar 0,2591 di Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga. Sedangkan, rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk rasio terburuk adalah 0,0000 di Desa Bitungsari dan Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi, Desa Karanggan Kecamatan Gunungputri, Desa Cimandala, Desa Cilebut Timur dan Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, dan Desa Cileungsi Kidul, Desa Cileungsi dan Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi.

Dari hasil analisis berdasarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, terdapat beberapa kecamatan yang memerlukan perhatian lebih karena seluruh desa/kelurahannya termasuk dalam kategori rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3), kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Sukaraja.

Sedangkan kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya termasuk kategori tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah Kecamatan Cariu, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Tenjolaya. Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per kecamatan disajikan pada tabel 5.

Tabel 5 Sebaran jumlah desa/kelurahan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Babakan Madang	0	1	5	3	0	0	9
Bojonggede	6	3	0	0	0	0	9
Caringin	0	0	1	2	3	6	12
Cariu	0	0	0	0	0	10	10
Ciampea	0	2	2	3	6	0	13
Ciawi	4	1	3	0	5	0	13
Cibinong	1	9	2	1	0	0	13
Cibungbulang	0	1	9	4	1	0	15
Cigombong	0	0	1	1	5	2	9
Cigudeg	0	0	0	0	2	13	15
Cijeruk	0	0	0	1	2	6	9
Cileungsi	4	3	3	1	1	0	12
Ciomas	3	5	1	2	0	0	11
Cisarua	3	5	2	0	0	0	10
Ciseeng	0	0	2	4	3	1	10
Citeureup	2	5	1	1	2	3	14
Dramaga	1	3	1	4	1	0	10
Gunungputri	7	3	0	0	0	0	10
Gunungsindur	0	0	0	1	8	1	10
Jasinga	0	0	0	0	2	14	16
Jonggol	0	0	3	2	1	8	14
Kemang	0	0	1	2	5	1	9
Klapanunggal	1	0	1	0	0	7	9
Leuwiliang	0	0	0	1	3	7	11
Leuwisadeng	0	0	0	0	4	4	8
Megamendung	0	2	4	3	3	0	12
Nanggung	0	0	1	1	5	4	11
Pamijahan	0	0	0	0	6	9	15
Parung	0	3	3	1	2	0	9
Parungpanjang	2	1	1	1	6	0	11
Rancabungur	0	0	0	0	4	3	7
Rumpin	0	1	2	5	6	0	14
Sukajaya	0	0	1	2	5	3	11
Sukamakmur	0	0	0	0	0	10	10

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Sukaraja	4	7	2	0	0	0	13
Tajurhalang	0	3	2	1	1	0	7
Tamansari	0	2	4	0	1	1	8
Tanjungsari	0	0	0	0	0	10	10
Tenjo	0	0	0	0	1	8	9
Tenjolaya	0	0	0	0	3	4	7
Total	38	60	58	47	97	135	435

2.1.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 desa dan 19 kelurahan antara tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil analisis pada indikator luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, jumlah desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 130 desa pada FSVA tahun 2023 menjadi 139 desa pada FSVA tahun 2024. Desa prioritas 1 meningkat dari 27 menjadi 34 desa. Desa prioritas 2 menurun dari 51 menjadi 49 desa. Desa prioritas 3 meningkat dari 52 menjadi 56 desa.

Untuk sebaran kelurahan, jumlah kelurahan yang termasuk rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) tidak mengalami perubahan dari FSVA 2023 ke 2024, yaitu tetap sebanyak 17 kelurahan. Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023 - 2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	27	4	31	34	4	38
2	51	10	61	49	11	60
3	52	3	55	56	2	58
4	42	1	43	46	1	47
5	89	0	89	96	1	97
6	155	1	156	135	0	135
Total	416	19	435	416	19	435

2.1.2 Perubahan prioritas ketahanan pangan desa/kelurahan pada indikator luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Tahun 2023 dan 2024

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan.

Hasil perbandingan prioritas ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di

Kabupaten Bogor, terdapat 42 desa (10,09%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat, 11 desa (2,64%) yang mengalami kenaikan 2 tingkat dan 5 desa (1,15%) yang mengalami kenaikan sebanyak 3 tingkat. Terdapat 6 desa (1,44%) yang mengalami penurunan 2 tingkat, 13 desa (2,99%) yang mengalami penurunan 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan tingkat prioritas yaitu sebanyak 339 desa (81,49%).

Untuk sebaran kelurahan, hasil perbandingan prioritas ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, terdapat 2 kelurahan (10,52%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat dan kelurahan yang tidak mengalami perubahan tingkat prioritas yaitu sebanyak 17 kelurahan (89,47%). Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	-2	-1	Tetap	1	2	3	Total
Babakan Madang	0	0	9	0	0	0	9
Bojonggede	0	0	9	0	0	0	9
Caringin	0	0	12	0	0	0	12
Cariu	0	0	10	0	0	0	10
Ciampea	0	0	13	0	0	0	13
Ciawi	1	0	7	3	2	0	13
Cibinong	0	0	12	1	0	0	13
Cibungbulang	0	3	3	6	2	1	15
Cigombong	0	0	9	0	0	0	9
Cigudeg	0	0	15	0	0	0	15
Cijeruk	0	0	9	0	0	0	9
Cileungsi	0	0	12	0	0	0	12
Ciomas	0	0	11	0	0	0	11
Cisarua	0	0	5	2	0	3	10
Ciseeng	0	0	6	4	0	0	10
Citeureup	0	0	14	0	0	0	14
Dramaga	0	2	5	0	3	0	10
Gunungputri	0	0	10	0	0	0	10
Gunungsindur	0	0	8	2	0	0	10
Jasinga	0	0	15	1	0	0	16
Jonggol	1	0	9	2	1	1	14
Kemang	0	0	5	4	0	0	9
Klapanunggal	0	0	9	0	0	0	9
Leuwiliang	0	0	11	0	0	0	11
Leuwisadeng	0	4	4	0	0	0	8
Megamendung	2	1	5	4	0	0	12
Nanggung	0	0	11	0	0	0	11
Pamijahan	0	0	14	1	0	0	15
Parung	0	0	9	0	0	0	9
Parungpanjang	0	0	6	5	0	0	11
Rancabungur	0	0	7	0	0	0	7
Rumpin	2	3	7	2	0	0	14
Sukajaya	0	0	3	5	3	0	11
Sukamakmur	0	0	10	0	0	0	10

Kecamatan	-2	-1	Tetap	1	2	3	Total
Sukaraja	0	0	13	0	0	0	13
Tajurhalang	0	0	7	0	0	0	7
Tamansari	0	0	8	0	0	0	8
Tanjungsari	0	0	10	0	0	0	10
Tenjo	0	0	8	1	0	0	9
Tenjolaya	0	0	6	1	0	0	7
Total	6	13	356	44	11	5	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas

A. Produksi Pertanian

Pemerintah Kabupaten Bogor telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Berdasarkan data pada Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024, lapangan usaha pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 5,31% dari PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Padi dan ubi kayu merupakan bahan pokok yang menyumbang produksi sereal dan umbi-umbian terbesar di Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2023, yaitu rata-rata dalam 5 tahun padi sebesar 79,47% dan ubi kayu sebesar 12,99%. Produksi sereal pokok dan umbi-umbian per tahun disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 4.

Tabel 8 Produksi sereal pokok dan umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Sereal	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 tahun
Padi	509.119	476.710	500.176	500.235	455.365	488.321
Jagung	1.260	1.675	498	766	1.597	1.159
Ubi Kayu	91.214	85.861	74.691	73.845	73.432	79.809
Ubi Jalar	44.688	48.295	43.045	42.010	47.752	45.158
T O T A L	646.281	612.540	618.410	616.856	578.146	614.447

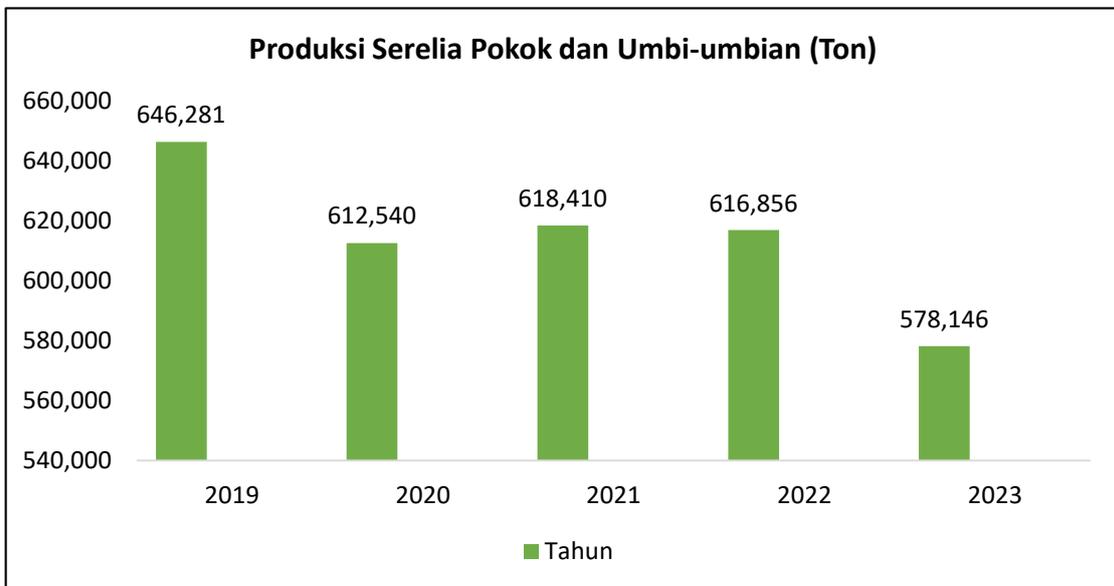
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Berdasarkan Tabel 8, produksi padi di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,97% dari tahun 2022, dimana produksi tahun 2023 sebanyak 455.365 ton, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 500.235 ton.

Produksi jagung mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Terdapat beberapa kali penurunan dan peningkatan produksi dari tahun 2019-2023. Produksi jagung di tahun 2023 sebesar 1.596 ton mengalami kenaikan 52,01% dari produksi tahun 2022 yang berada di angka 766 ton.

Untuk produksi ubi kayu mengalami trend penurunan dalam 5 tahun terakhir. Produksi tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 91.214 ton dan terendah di tahun 2023 yaitu sebesar 73.432 ton.

Produksi ubi jalar di tahun 2023 sebanyak 47.752 ton, mengalami kenaikan 12,02% dari tahun 2022 yang berjumlah 42.010 ton. Rata-rata produksi ubi jalar sebanyak 5 tahun terakhir yaitu sebesar 45.158 ton.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Gambar 4 Produksi serelia dan umbi-umbian Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

Tahun 2023, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 578.146 ton (padi 455.365 ton, jagung 1.596 ton, ubi kayu 73.432 ton dan ubi jalar 47.752 ton). Produksi serealia pertahun per kecamatan di Kabupaten Bogor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Produksi total serealia pokok dan umbi-umbian per tahun dan laju pertumbuhan produksi (2019-2023)

No	KECAMATAN	Produksi Serelia Pokok dan Umbi-umbian (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenjo	21,176	24,152	23,429	18,628	15,925
2	Parungpanjang	17,769	16,232	18,477	18,705	13,298
3	Jasinga	26,348	21,192	25,108	25,536	21,219
4	Cigudeg	22,364	18,733	21,929	22,334	20,452
5	Sukajaya	26,905	18,177	23,606	22,657	20,316
6	Nanggung	26,040	23,220	23,360	25,940	20,835
7	Rumpin	20,532	17,798	21,791	17,935	18,154
8	Leuwiliang	25,971	26,386	27,353	25,483	23,023
9	Leuwisadeng	12,796	11,572	11,747	12,166	11,380
10	Cibungbulang	25,544	26,232	25,118	27,097	28,898
11	Pamijahan	67,816	71,313	59,395	55,553	55,468
12	Ciampea	20,172	16,909	18,829	17,684	22,551
13	Tenjolaya	19,245	18,865	18,489	19,547	15,986
14	Gunungsindur	4,865	4,029	4,230	3,518	2,160
15	Parung	2,041	1,663	1,438	1,826	2,701
16	Ciseeng	6,043	5,937	6,075	4,639	3,448
17	Bojonggede	1,234	412	515	424	258
18	Tajurhalang	3,954	3,427	3,763	3,110	2,750
19	Kemang	3,185	3,022	2,828	2,390	2,092
20	Rancabungur	7,865	5,993	4,808	4,576	3,832
21	Dramaga	12,260	9,842	10,278	13,039	13,113
22	Ciomas	6,787	6,155	6,351	6,221	3,925
23	Tamansari	11,180	11,859	11,709	10,963	9,474
24	Cijeruk	10,888	10,444	8,711	8,310	9,455
25	Cigombong	10,889	8,342	10,207	9,975	7,743
26	Caringin	14,109	13,677	14,320	14,101	14,078

No	KECAMATAN	Produksi Serelia Pokok dan Umbi-umbian (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
27	Ciawi	6,916	6,544	6,684	6,903	6,406
28	Megamendung	3,073	3,277	3,006	3,175	3,447
29	Cisarua	2,886	2,705	2,726	2,358	2,092
30	Sukaraja	6,842	5,091	4,239	6,006	3,681
31	Citeureup	8,145	8,887	7,179	6,197	4,892
32	Babakan Madang	4,447	3,887	3,500	3,950	2,914
33	Cibinong	2,611	1,082	1,211	1,410	716
34	Gunungputri	634	570	552	478	358
35	Cileungsi	7,267	6,745	7,402	7,435	5,957
36	Klapanunggal	14,007	12,703	13,247	12,135	11,082
37	Jonggol	47,210	49,759	46,549	46,317	45,406
38	Sukamakmur	52,477	49,865	55,766	61,836	64,419
39	Cariu	29,042	31,717	29,855	30,681	29,182
40	Tanjungsari	32,743	34,128	32,627	35,619	35,062
JUMLAH		646,281	612,540	618,410	616,856	578,146

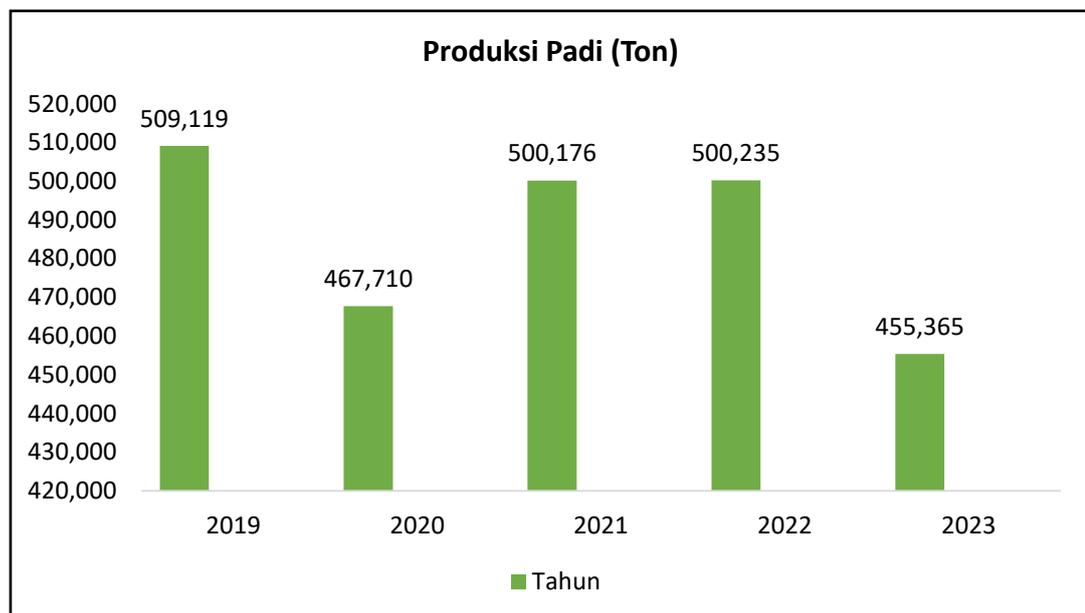
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dalam Kabupaten Bogor Dalam Angka 2019-2023

1. Produksi Komoditas Padi

Produksi padi tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 sebesar 509.119 ton sedangkan terendah di tahun 2023 sebesar 455.365 ton. Terjadi penurunan sebesar 10,56% dari tahun 2019 ke tahun 2023.

Produksi padi tertinggi dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) terjadi pada tahun 2023 di Kecamatan Sukamakmur sebesar 57.395 ton. Sentra produksi padi di Kabupaten Bogor dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) berada di Kecamatan Sukamakmur dengan rata-rata produksi 51.310 ton, Kecamatan Jonggol dengan rata-rata produksi 47.047 ton, Kecamatan Pamijahan dengan rata-rata produksi 44.471 ton, Kecamatan Tanjungsari dengan rata-rata produksi 33.900 ton, dan Kecamatan Cariu dengan rata-rata produksi 30.158 ton.

Grafik perkembangan produksi padi Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 5. Sedangkan data produksi padi per kecamatan di Kabupaten Bogor dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 5.



Gambar 5 Produksi padi Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

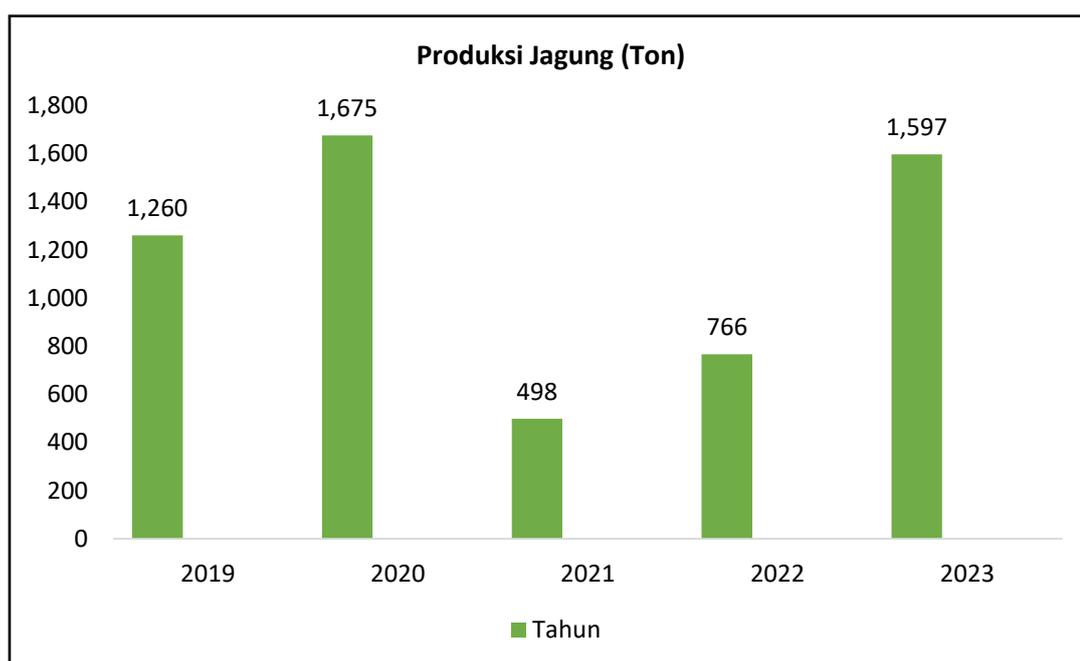
Tabel 10 Produksi padi tahun 2019 – 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Padi (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tenjo	18,686	20,663	20,346	16,578	14,544	18,163
2	Parungpanjang	17,132	15,257	17,684	17,878	12,894	16,169
3	Jasinga	25,532	20,291	23,966	24,791	20,540	23,024
4	Cigudeg	20,942	17,975	20,718	21,424	19,663	20,144
5	Sukajaya	25,873	17,128	22,238	21,985	19,823	21,409
6	Nanggung	25,164	22,040	22,436	24,798	19,958	22,879
7	Rumpin	19,025	16,513	19,582	15,296	13,953	16,874
8	Leuwiliang	24,452	24,852	25,489	23,725	21,673	24,038
9	Leuwisadeng	11,922	10,782	10,994	11,048	10,465	11,042
10	Cibungbulang	13,701	14,037	12,714	11,350	8,035	11,967
11	Pamijahan	44,695	42,387	44,881	47,870	44,362	44,839
12	Ciampea	6,182	6,286	6,486	5,813	6,012	6,156
13	Tenjolaya	14,571	13,591	14,153	16,287	12,881	14,297
14	Gunungsindur	2,151	1,856	2,001	1,570	1,002	1,716
15	Parung	509	396	429	380	296.13	402
16	Ciseeng	2,325	1,542	1,660	1,066	696.12	1,458
17	Bojonggede	2	1	1	1	1.23	1
18	Tajurhalang	786	412	534	403	240.12	475
19	Kemang	1,574	1,196	1,029	669	522.49	998
20	Rancabungur	2,102	1,459	1,254	939	605.44	1,272
21	Dramaga	1,990	1,660	1,693	1,460	907.38	1,542
22	Ciomas	2,757	2,280	2,425	2,510	1,866	2,368
23	Tamansari	4,671	4,118	4,226	3,650	2,900	3,913
24	Cijeruk	9,171	8,536	6,902	6,988	7,036	7,727
25	Cigombong	10,589	8,041	9,938	9,290	7,567	9,085
26	Caringin	13,065	12,043	12,635	12,329	13,059	12,626
27	Ciawi	5,157	4,418	5,067	5,483	5,004	5,026
28	Megamendung	1,766	1,675	1,656	1,662	2,324	1,817
29	Cisarua	2,202	2,176	2,109	1,861	1,678	2,005
30	Sukaraja	170	119	125	63	52.22	106
31	Citeureup	2,238	2,545	2,234	1,895	1,656	2,114
32	Babakan Madang	2,187	1,453	1,353	1,055	990.17	1,408
33	Cibinong	454	265	333	86	45.49	237
34	Gunungputri	548	501	469	419	290.20	445
35	Cileungsi	6,691	6,234	6,753	7,115	5,684	6,495
36	Klapanunggal	13,737	12,479	13,092	12,048	10,705	12,412
37	Jonggol	45,513	47,934	45,777	46,085	45,147	46,091
38	Sukamakmur	48,415	47,108	52,947	56,845	57,395	52,542
39	Cariu	28,633	31,238	29,657	30,439	28,867	29,767
40	Tanjungsari	31,841	33,224	32,191	35,078	34,025	33,272
JUMLAH		509,119	476,710	500,176	500,235	455,365	488,321

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

2. Jagung

Pada tahun 2023, produksi jagung sebesar 1.596,86 ton, hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 766 ton. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.675 ton. Peningkatan produksi pada tahun 2019 disebabkan adanya pelaksanaan program Upaya Khusus Padi Jagung Kedele (UPSUS PAJALE). Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Tenjo sebesar 605 ton di tahun 2020 menyusul Kecamatan Jonggol sebesar 418 ton di tahun 2020.



Gambar 6 Produksi jagung Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

Tabel 11 Produksi jagung tahun 2019 - 2023 (Ton)

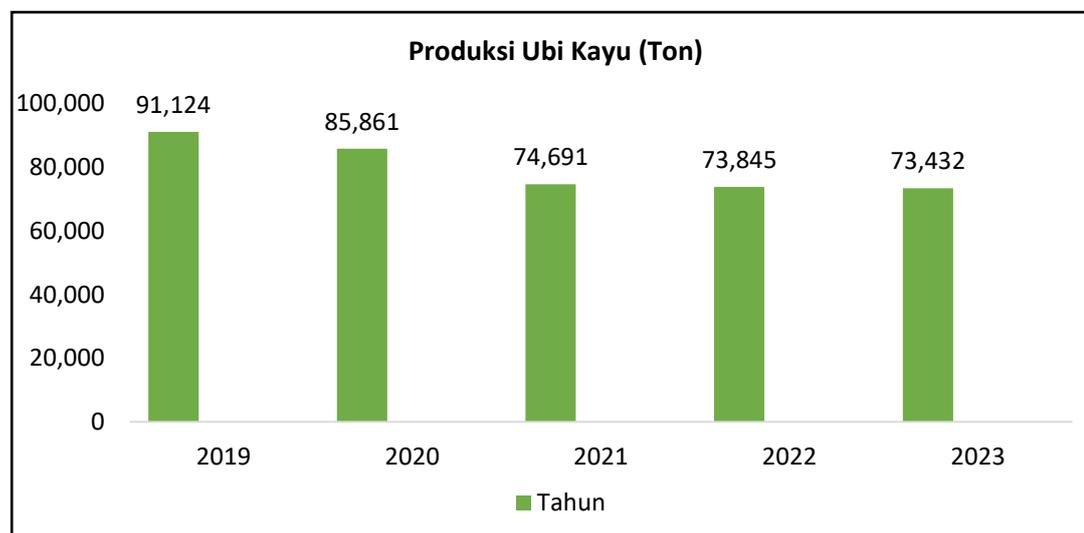
No	KECAMATAN	Produksi Jagung (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tenjo	395	605	10	86	352	290
2	Parungpanjang	176	162	170	83	28	124
3	Jasinga	43	91	126	166	91	103
4	Cigudeg	-	-	-	-	-	-
5	Sukajaya	-	-	-	17	-	3
6	Nanggung	-	-	24	-	-	5
7	Rumpin	104	115	45	168	249	136
8	Leuwiliang	-	-	-	-	-	-
9	Leuwisadeng	-	-	-	-	-	-
10	Cibungbulang	-	-	-	-	38	8
11	Pamijahan	-	-	-	-	-	-
12	Ciampea	-	-	-	-	22	4
13	Tenjolaya	-	-	-	-	-	-
14	Gunungsindur	89	55	-	-	-	29
15	Parung	8	-	-	-	-	2
16	Ciseeng	-	-	-	-	-	-
17	Bojonggede	-	-	-	-	-	-
18	Tajurhalang	-	-	-	-	-	-
19	Kemang	-	-	-	-	-	-
20	Rancabungur	-	-	-	-	-	-
21	Dramaga	-	-	-	-	-	-

No	KECAMATAN	Produksi Jagung (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
22	Ciomas	-	-	-	-	-	-
23	Tamansari	-	-	-	-	-	-
24	Cijeruk	-	-	-	-	-	-
25	Cigombong	9	5	-	11	9	7
26	Caringin	18	-	25	95	22	40
27	Ciawi	-	-	-	-	-	-
28	Megamendung	-	-	-	-	-	-
29	Cisarua	-	-	-	-	-	-
30	Sukaraja	-	-	-	-	-	-
31	Citeureup	-	-	5	16	74	19
32	Babakan Madang	-	-	-	-	-	-
33	Cibinong	-	-	-	11	12	5
34	Gunungputri	-	-	-	-	-	-
35	Cileungsi	-	-	-	-	-	-
36	Klapanunggal	-	-	-	22	274	59
37	Jonggol	119	418	88	44	39	142
38	Sukamakmur	74	38	4	47	278	88
39	Cariu	138	-	-	-	-	28
40	Tanjungsari	87	186	-	-	110	77
JUMLAH		1,260	1,260	1,675	498	766	1,159

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

3. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 91.214 ton menjadi 73.432 ton. Selama lima tahun terakhir, produksi ubi kayu terbesar di Kabupaten Bogor terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 91.214 ton. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 meliputi Kecamatan Cibungbulang (10.204 ton), Kecamatan Ciampea (9.010 ton), Kecamatan Sukaraja (3.495 ton) dan Kecamatan Dramaga (4.745 ton). Rincian produksi ubi kayu di Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 12 dan gambar 7.



Gambar 7 Produksi ubi kayu Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

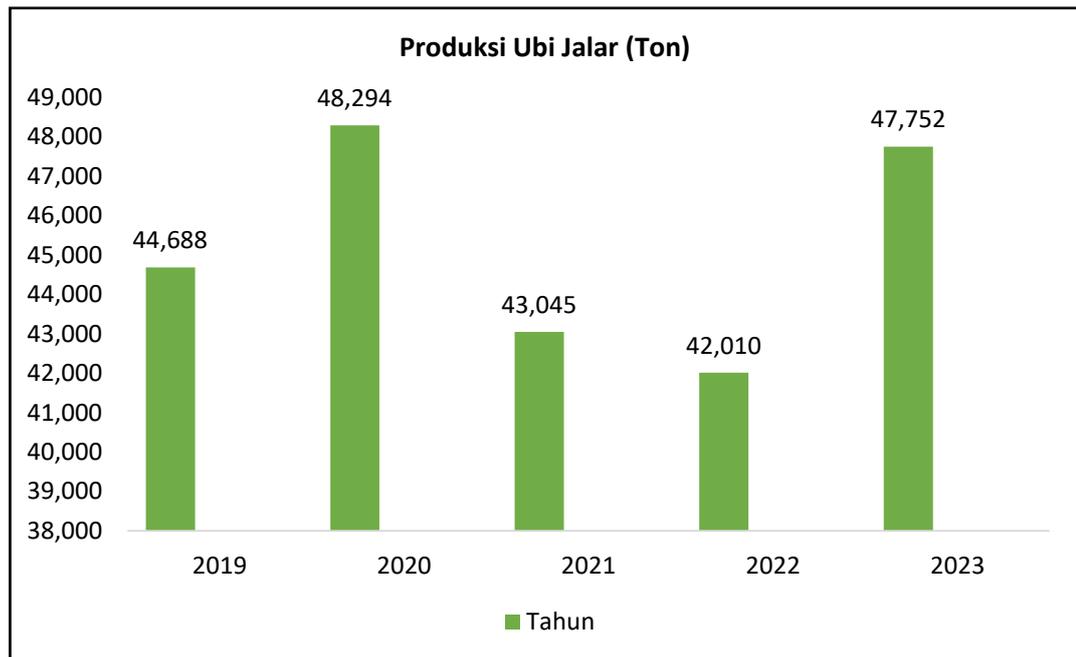
Tabel 12 Produksi ubi kayu tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	KECAMATAN	Produksi Ubi kayu (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tenjo	1,887	2,483	2,507	1,555	926.2	1,871.6
2	Parungpanjang	305	525	388	476	256.9	390.2
3	Jasinga	595	616	652	348	459.6	534.1
4	Cigudeg	930	386	577	490	365.0	549.6
5	Sukajaya	584	563	702	341	300.8	498.2
6	Nanggung	532	729	512	830	493.7	619.3
7	Rumpin	1,282	910	1,750	2,057	3,374.5	1,874.7
8	Leuwiliang	1,047	1,072	1,313	1,354	878.4	1,132.9
9	Leuwisadeng	712	594	481	685	479.0	590.2
10	Cibungbulang	8,415	7,075	7,045	8,457	10,203.8	8,239.2
11	Pamijahan	11,027	15,113	6,609	4,278	6,333.8	8,672.2
12	Ciampea	9,362	7,513	7,167	6,169	9,010.4	7,844.3
13	Tenjolaya	1,873	2,202	2,068	1,460	900.7	1,700.7
14	Gunungsindur	2,525	1,955	1,976	1,796	1,087.7	1,867.9
15	Parung	1,263	1,068	825	984	2,112.5	1,250.5
16	Ciseeng	2,979	3,418	3,362	2,672	2,095.9	2,905.4
17	Bojonggede	1,132	340	337	327	241.1	475.4
18	Tajurhalang	2,532	2,435	2,741	2,301	2,120.3	2,425.9
19	Kemang	1,248	1,495	1,458	1,367	1,263.3	1,366.3
20	Rancabungur	2,673	2,827	2,301	2,165	2,481.1	2,489.4
21	Dramaga	5,978	3,888	4,562	5,753	4,744.9	4,985.2
22	Ciomas	2,463	2,031	2,214	1,863	1,129.4	1,940.1
23	Tamansari	3,207	3,444	3,493	3,183	2,254.1	3,116.2
24	Cijeruk	1,259	1,226	1,124	774	1,225.8	1,121.8
25	Cigombong	177	180	172	345	87.3	192.3
26	Caringin	571	1,088	1,124	901	604.8	857.8
27	Ciawi	777	1,095	764	616	685.3	787.5
28	Megamendung	325	315	150	364	278.7	286.5
29	Cisarua	290	177	255	170	192.2	216.8
30	Sukaraja	6,348	4,653	3,849	5,764	3,495.0	4,821.8
31	Citeureup	5,857	6,290	4,840	4,143	3,043.5	4,834.7
32	Babakan Madang	2,260	2,395	2,147	2,895	1,924.1	2,324.2
33	Cibinong	2,035	673	760	1,246	620.3	1,066.9
34	Gunungputri	71	50	43	49	47.2	52.0
35	Cileungsi	342	224	423	232	181.6	280.5
36	Klapanunggal	211	177	117	31	70.4	121.3
37	Jonggol	1,199	919	514	107	142.4	576.3
38	Sukamakmur	3,861	2,656	2,815	4,723	6,402.3	4,091.5
39	Cariu	264	377	117	98	146.4	200.5
40	Tanjungsari	815	686	436	477	771.7	637.1
	JUMLAH	91,214	85,861	74,691	73,845	73,431.9	79,808.6

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

4. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi. Untuk produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 48.294 ton. Di tahun 2023, produksi ubi jalar terbanyak terdapat di Kecamatan Cibungbulang (10.621 ton), Kecamatan Dramaga (7.460 ton), Kecamatan Ciampea (7.507 ton), Kecamatan Tamansari (4.319 ton). Rincian produksi ubi jalar tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 13 dan gambar 8.



Gambar 8 Produksi ubi jalar Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

Tabel 13 Produksi ubi jalar tahun 2019-2023 (Ton)

No	KECAMATAN	Produksi Ubi kayu (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tenjo	208	401	566	409	103.1	337.4
2	Parungpanjang	156	288	235	268	118.7	213.1
3	Jasinga	178	194	364	231	128.0	219.0
4	Cigudeg	492	372	634	420	423.3	468.3
5	Sukajaya	448	486	666	314	192.1	421.2
6	Nanggung	344	451	388	312	382.8	375.6
7	Rumpin	121	260	414	414	578.3	357.5
8	Leuwiliang	472	462	551	404	471.9	472.2
9	Leuwisadeng	162	196	272	433	436.1	299.8
10	Cibungbulang	3,428	5,120	5,359	7,290	10,620.7	6,363.5
11	Pamijahan	12,094	13,813	7,905	3,405	4,772.5	8,397.9
12	Ciampea	4,628	3,110	5,176	5,702	7,506.6	5,224.5
13	Tenjolaya	2,801	3,072	2,268	1,800	2,203.7	2,428.9
14	Gunungsindur	100	163	253	152	70.4	147.7
15	Parung	261	199	184	462	292.2	279.6
16	Ciseeng	739	977	1,053	901	656.0	865.2
17	Bojonggede	100	71	177	96	15.5	91.9
18	Tajurhalang	636	580	488	406	389.4	499.9
19	Kemang	363	331	341	354	306.2	339.0

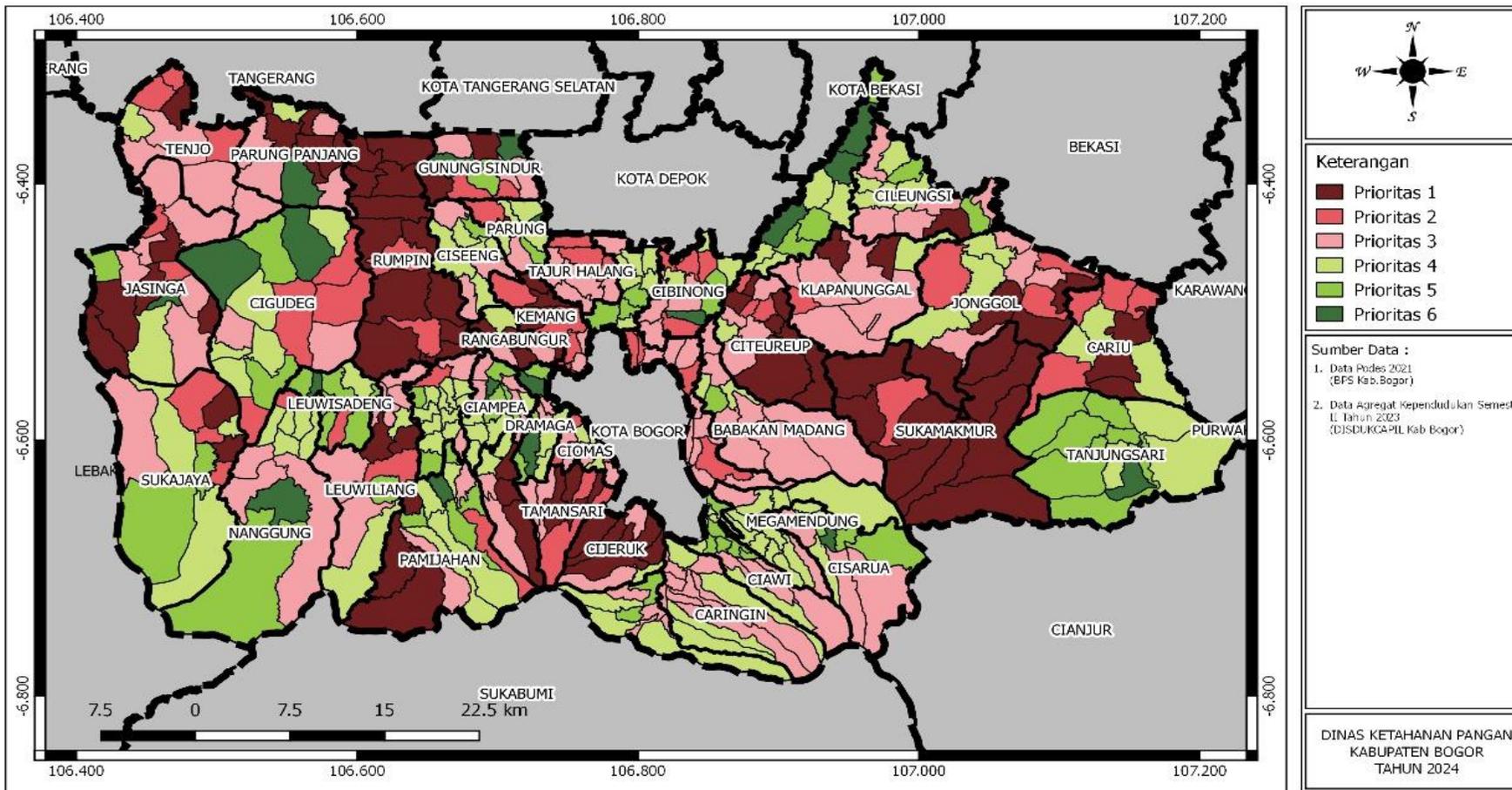
No	KECAMATAN	Produksi Ubi kayu (Ton)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
20	Rancabungur	3,090	1,707	1,253	1,472	745.8	1,653.6
21	Dramaga	4,292	4,294	4,023	5,826	7,460.6	5,179.1
22	Ciomas	1,567	1,844	1,712	1,848	929.8	1,580.2
23	Tamansari	3,302	4,297	3,990	4,130	4,319.8	4,007.8
24	Cijeruk	458	682	685	548	1,193.0	713.2
25	Cigombong	114	116	97	329	80.0	147.2
26	Caringin	455	546	536	776	392.4	541.1
27	Ciawi	982	1,031	853	804	716.5	877.3
28	Megamendung	982	1,287	1,200	1,149	843.7	1,092.3
29	Cisarua	394	352	362	327	221.9	331.4
30	Sukaraja	324	319	265	179	134.1	244.2
31	Citeureup	50	52	100	143	118.5	92.7
32	Babakan Madang	-	39	-	-	-	7.8
33	Cibinong	122	144	118	67	38.6	97.9
34	Gunungputri	15	19	40	10	20.2	20.8
35	Cileungsi	234	287	226	88	91.6	185.3
36	Klapanunggal	59	47	38	34	32.6	42.1
37	Jonggol	379	488	170	81	78.1	239.2
38	Sukamakmur	127	63	-	221	343.8	151.0
39	Cariu	7	102	81	144	168.4	100.5
40	Tanjungsari	-	32	-	64	155.5	50.3
JUMLAH		44,688	48,294	43,045	42,010	47,752.0	45,157.8

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

BADAN PANGAN NASIONAL

PETA RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KABUPATEN BOGOR





Gambar 9 Peta rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Bogor

2.2 Indikator Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dan lain-lain) dengan jumlah rumah tangga di desa/kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa/kelurahan, maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa/kelurahan tersebut.

Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga digunakan data di tingkat desa/kelurahan, sebagai berikut:

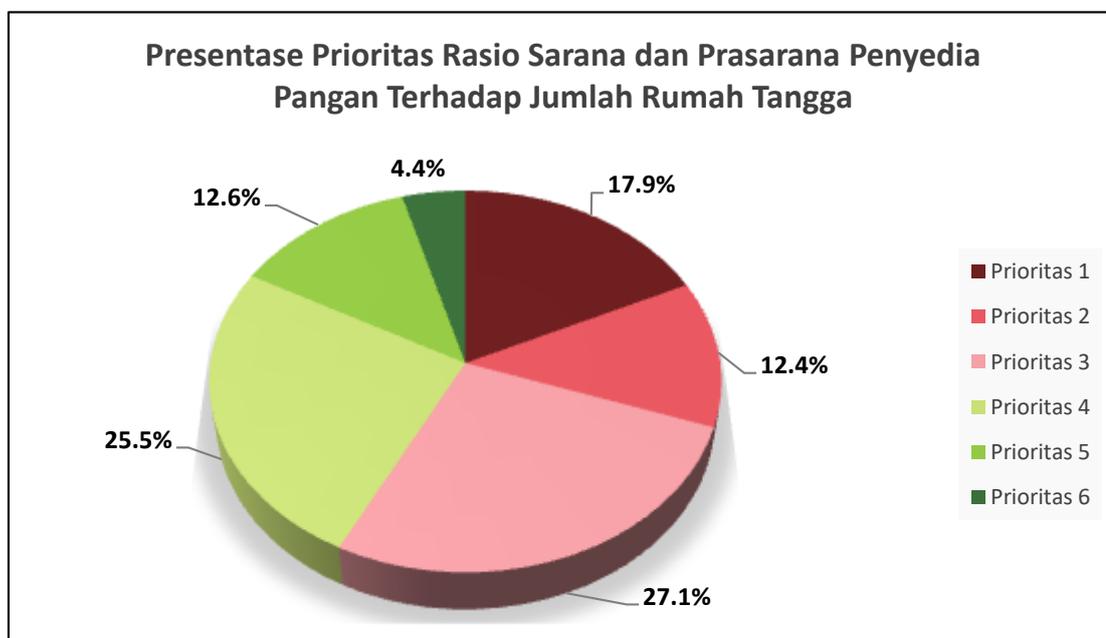
- a. Data jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan yang bersumber dari Podes tahun 2021; dan
- b. Data jumlah rumah tangga tahun 2023 yang bersumber Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Sumber Disdukcapil Kabupaten Bogor).

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata skor rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 8,18 *point* dan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 10,48 *point*.

Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga untuk setiap prioritas disajikan pada tabel 14. Sedangkan, persentase rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga disajikan pada gambar 10.

Tabel 14 Sebaran desa/kelurahan pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas

No	Prioritas	Range Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Total
1	Prioritas 1	$\leq 0,0152$	76	2	78
2	Prioritas 2	0,0152 – 0,0210	50	4	54
3	Prioritas 3	0,0210 – 0,0360	114	4	118
4	Prioritas 4	0,0360 – 0,0569	106	5	111
5	Prioritas 5	0,0569 – 0,0890	53	2	55
6	Prioritas 6	$> 0,0890$	17	2	19



Gambar 10 Presentase skala prioritas pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Bogor

Dari 416 desa, sebanyak 76 desa (18,3%) masuk prioritas 1, sebanyak 50 desa (12,0%) masuk prioritas 2, sebanyak 114 desa (27,4%) masuk prioritas 3, sebanyak 106 desa (25,5%) masuk prioritas 4, sebanyak 53 desa (12,7%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 17 desa (4,1%) masuk prioritas 6.

Dari 19 kelurahan, sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 1, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 2, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 3, sebanyak 5 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 6.

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Bogor terendah (rasio terburuk) adalah 0.0004 di Desa Purwabakti dan Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan dan (rasio paling baik) adalah 0,2261 di Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng.

Dari hasil analisis indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga ada 4 (empat) kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Kecamatan Kemang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang, dan Kecamatan Tamansari. Hal ini dikarenakan seluruh desa di 4 (empat) wilayah kecamatan tersebut termasuk ke dalam prioritas rentan rawan pangan (termasuk prioritas 1-3). Sedangkan untuk Kecamatan yang seluruh desanya masuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4-6) adalah Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Gunungputri.

Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan disajikan pada tabel 15.

Tabel 15 Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Babakan Madang	0	0	6	2	1	0	9
Bojonggede	0	0	1	5	3	0	9
Caringin	0	0	8	4	0	0	12
Cariu	3	4	0	3	0	0	10
Ciampea	0	0	4	5	3	1	13
Ciawi	0	0	3	4	6	0	13
Cibinong	0	4	3	3	2	1	13
Cibungbulang	0	1	2	10	2	0	15
Cigombong	0	0	4	3	2	0	9
Cigudeg	0	4	2	5	2	2	15
Cijeruk	6	0	2	1	0	0	9
Cileungsi	1	0	5	4	2	0	12
Ciomas	0	3	5	3	0	0	11
Cisarua	0	0	3	3	3	1	10
Ciseeng	0	0	3	6	1	0	10
Citeureup	6	3	4	1	0	0	14
Dramaga	0	0	2	3	3	2	10
Gunungputri	0	0	0	4	3	3	10
Gunungsindur	2	2	3	0	1	2	10
Jasinga	5	2	6	1	1	1	16
Jonggol	4	3	4	3	0	0	14
Kemang	3	4	2	0	0	0	9
Klapanunggal	2	1	5	1	0	0	9
Leuwiliang	2	1	5	2	1	0	11
Leuwisadeng	0	1	0	1	5	1	8
Megamendung	0	0	2	10	0	0	12
Nanggung	0	1	3	5	1	1	11
Pamijahan	3	1	2	4	4	1	15
Parung	1	1	1	4	1	1	9
Parungpanjang	5	0	4	1	0	1	11
Rancabungur	4	0	2	1	0	0	7
Rumpin	12	2	0	0	0	0	14
Sukajaya	2	3	1	3	2	0	11
Sukamakmur	9	1	0	0	0	0	10
Sukaraja	0	4	9	0	0	0	13
Tajurhalang	0	3	4	0	0	0	7
Tamansari	4	2	2	0	0	0	8
Tanjungsari	0	0	0	3	6	1	10
Tenjo	1	3	4	1	0	0	9
Tenjolaya	3	0	2	2	0	0	7
Total	78	54	118	111	55	19	435

2.2.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 desa dan 19 kelurahan antara tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil analisis pada indikator sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, jumlah desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 235 desa (56,49%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 240 desa (57,69%) pada FSVA tahun 2024. Desa prioritas 1 meningkat dari 75 (18,02%) menjadi 76 desa (18,26%). Desa prioritas 2 meningkat dari 44 (10,57%) menjadi 50 desa (12,01%). Desa prioritas 3 menurun dari 116 (27,88%) menjadi 114 desa (27,40%).

Untuk sebaran kelurahan, tidak ada perubahan jumlah baik itu untuk yang termasuk rentan rawan pangan maupun yang tahan pangan. Sebanyak 10 kelurahan (52,63%) prioritas 1-3 pada FSVA 2023 dan FSVA 2024.

Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 16 berikut.

Tabel 16 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023-2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	75	2	77	76	2	78
2	44	4	48	50	4	54
3	116	4	120	114	4	118
4	108	5	113	106	5	111
5	54	2	56	53	2	55
6	19	2	21	17	2	19
Total	416	19	435	416	19	435

2.2.2 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan pada Indikator Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bogor

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan.

Hasil perbandingan prioritas ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 18 desa (4,32%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan status adalah sebanyak 398 desa (95,67%).

Untuk sebaran kelurahan, dari total 19 kelurahan tidak ada kelurahan yang mengalami perubahan prioritas ketahanan pangan. Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 17.

Tabel 17 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	Tetap	1	Total
Babakan Madang	9	0	9
Bojonggede	9	0	9
Caringin	12	0	12
Cariu	10	0	10
Ciampea	12	1	13
Ciawi	13	0	13
Cibinong	13	0	13
Cibungbulang	14	1	15
Cigombong	9	0	9
Cigudeg	12	3	15
Cijeruk	9	0	9
Cileungsi	12	0	12
Ciomas	11	0	11
Cisarua	10	0	10
Ciseeng	8	2	10
Citeureup	14	0	14
Dramaga	10	0	10
Gunungputri	10	0	10
Gunungsindur	8	2	10
Jasinga	16	0	16
Jonggol	14	0	14
Kemang	8	1	9
Klapanunggal	9	0	9
Leuwiliang	11	0	11
Leuwisadeng	8	0	8
Megamendung	12	0	12
Nanggung	11	0	11
Pamijahan	14	1	15
Parung	8	1	9
Parungpanjang	10	1	11
Rancabungur	7	0	7
Rumpin	14	0	14
Sukajaya	10	1	11
Sukamakmur	10	0	10
Sukaraja	12	1	13
Tajurhalang	6	1	7
Tamansari	8	0	8
Tanjungsari	10	0	10
Tenjo	8	1	9
Tenjolaya	6	1	7
Total	417	18	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas

BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya:

- 1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi;
- 2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau
- 3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten Tahun 2024, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu:

- 1) Indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; dan
- 2) Indikator Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata indeks akses pangan untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 83,58 *point* dan rata-rata indeks akses pangan untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 90,79 *point*.

3.1 Indikator Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin cenderung fluktuatif. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di tahun 2023 sebesar 7,27% (453.760 jiwa), menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,73% (474.740 jiwa).

Tabel 18 Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tahun 2014-2023

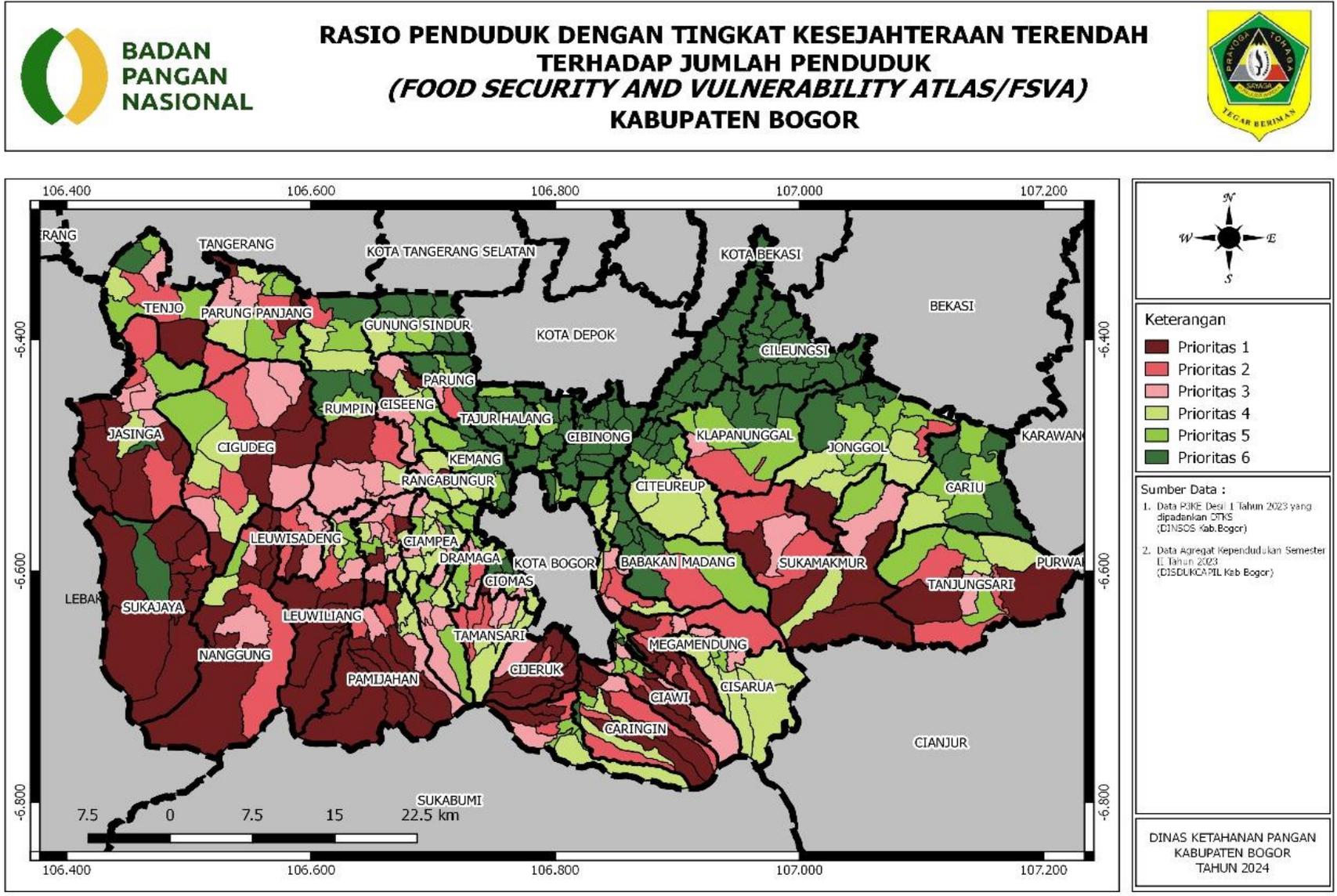
Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
2014	280.312	479.100	8,91
2015	290.874	487.100	8,96
2016	317.430	490.800	8,83
2017	337.550	487.300	8,57
2018	359.787	415.020	7,14
2019	373.799	395.000	6,66
2020	402.877	465.600	7,69
2021	418.483	491.200	8,13
2022	443.787	474.740	7,73

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
2023	482.174	453.760	7,27

Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024, BPS

Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa digunakan data di tingkat desa/kelurahan sebagai berikut:

- a. Data jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 Tahun 2023 yang dibandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Sumber Dinas Sosial Kabupaten Bogor); dan
- b. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Sumber Disdukcapil Kabupaten Bogor).



Gambar 11 Peta rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, indeks rata-rata skor rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 67,17 *point* dan rata-rata skor rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 81,58 *point*.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang digunakan untuk rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan di Kabupaten Bogor, rasio tertinggi (kondisi rasio terburuk) adalah 0,5897 di Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya. Sedangkan rasio terendah (rasio paling baik) adalah 0,0014 di Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal.

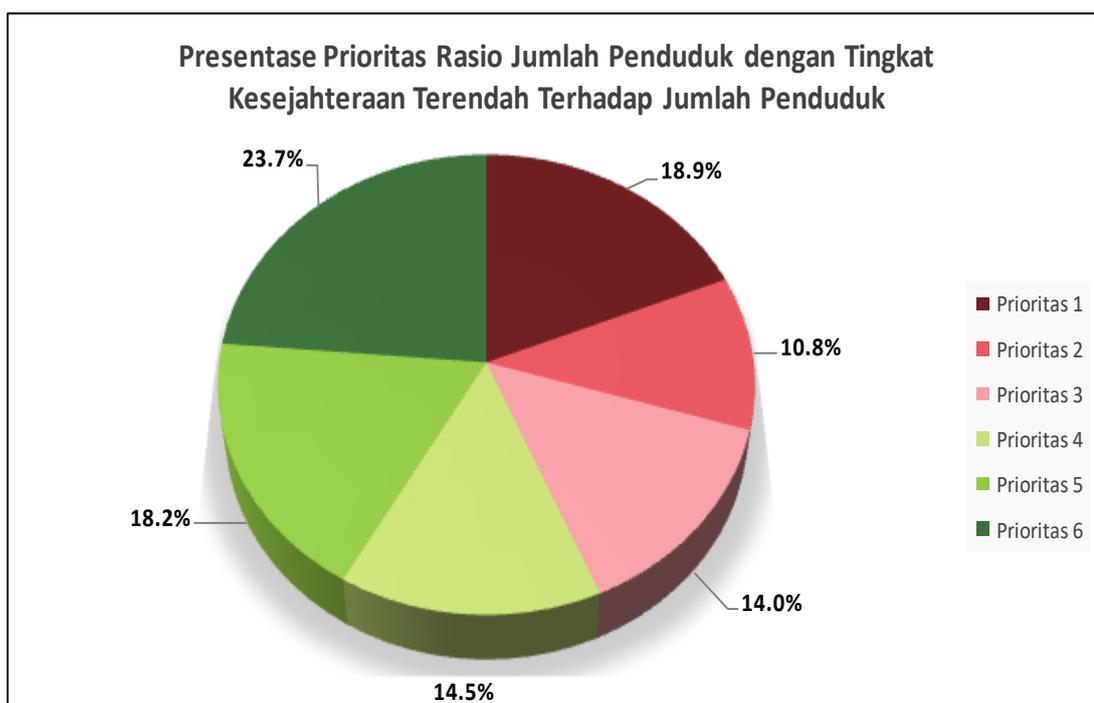
Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa disajikan pada tabel 20. Sedangkan, persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa disajikan pada gambar 12.

Tabel 19 Sebaran desa/kelurahan pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan berdasarkan skala prioritas

No	Prioritas	Range Rasio Kesejahteraan Terendah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Total
1	Prioritas 1	$\geq 0,1356$	82	0	82
2	Prioritas 2	0,1037 – 0,1356	47	0	47
3	Prioritas 3	0,0777 – 0,1037	61	0	61
4	Prioritas 4	0,0528 – 0,0777	63	0	63
5	Prioritas 5	0,0281 – 0,0528	78	1	79
6	Prioritas 6	$< 0,0281$	85	18	103

Dari 416 desa di Kabupaten Bogor, untuk indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan sebanyak 82 desa (19,71%) yang termasuk Prioritas 1, sebanyak 47 desa (11,29%) termasuk prioritas 2, sebanyak 61 desa (14,66%) masuk Prioritas 3, sebanyak 63 desa (15,14%) termasuk Prioritas 4, sebanyak 78 desa (18,75%) termasuk Prioritas 5, dan sebanyak 85 desa (20,43%) termasuk Prioritas 6.

Dari total 19 kelurahan, terdapat 1 kelurahan (5,26%) termasuk prioritas 5 dan sebanyak 18 kelurahan (94,73%) termasuk prioritas 6.



Gambar 12 Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan

Dari hasil analisis indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa ada 3 kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Leuwisadeng dan Kecamatan Megamendung. Hal tersebut dikarenakan seluruh desa di 3 kecamatan tersebut termasuk kedalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1-3). Sedangkan untuk wilayah yang seluruh desa/kelurahannya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4-6) terdapat di 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cariu, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Tajurhalang.

Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan per kecamatan disajikan pada tabel 20.

Tabel 20 Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Babakan Madang	0	1	0	1	1	6	9
Bojonggede	0	0	0	0	2	7	9
Caringin	4	3	1	2	1	1	12
Cariu	0	0	0	1	4	5	10
Ciampea	0	0	3	7	2	1	13

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Ciawi	3	1	3	0	5	1	13
Cibinong	0	0	0	0	0	13	13
Cibungbulang	3	1	6	4	1	0	15
Cigombong	2	2	1	1	3	0	9
Cigudeg	4	3	4	3	1	0	15
Cijeruk	7	1	1	0	0	0	9
Cileungsi	0	0	0	0	0	12	12
Ciomas	1	0	2	2	3	3	11
Cisarua	0	0	3	5	2	0	10
Ciseeng	2	0	3	2	3	0	10
Citeureup	0	0	0	3	4	7	14
Dramaga	0	2	2	2	4	0	10
Gunungputri	0	0	0	0	0	10	10
Gunungsindur	0	0	0	1	2	7	10
Jasinga	7	3	3	1	1	1	16
Jonggol	1	1	0	4	5	3	14
Kemang	0	0	0	0	4	5	9
Klapanunggal	0	1	1	0	3	4	9
Leuwiliang	5	1	2	1	2	0	11
Leuwisadeng	4	2	2	0	0	0	8
Megamendung	6	5	1	0	0	0	12
Nanggung	5	2	2	1	1	0	11
Pamijahan	8	2	2	3	0	0	15
Parung	0	1	1	0	2	5	9
Parungpanjang	2	1	2	2	4	0	11
Rancabungur	1	0	1	3	2	0	7
Rumpin	1	2	3	3	2	3	14
Sukajaya	9	1	0	0	0	1	11
Sukamakmur	4	2	2	1	1	0	10
Sukaraja	0	2	2	3	4	2	13
Tajurhalang	0	0	0	0	2	5	7
Tamansari	0	3	2	3	0	0	8
Tanjungsari	2	2	1	2	3	0	10
Tenjo	1	2	1	1	3	1	9
Tenjolaya	0	0	4	1	2	0	7
Total	82	47	61	63	79	103	435

3.1.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 435 desa/kelurahan antara tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil analisis pada indikator jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk, jumlah desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 182 desa pada FSVA tahun 2023 menjadi 190 desa pada FSVA tahun 2024. Desa yang termasuk prioritas 1 meningkat dari 77 menjadi 82 desa. Desa yang termasuk prioritas 2 meningkat dari 40 menjadi 47 desa. Desa prioritas 3 menurun dari 65 menjadi 61 desa.

Dari total 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, tidak terdapat perubahan prioritas kerentanan terhadap kerawanan pangan. Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 21 berikut.

Tabel 21 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023 - 2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	77	0	77	82	0	82
2	40	0	40	47	0	47
3	65	0	65	61	0	61
4	67	0	67	63	0	63
5	77	1	78	78	1	79
6	90	18	108	85	18	103
Total	416	19	435	416	19	435

3.1.2 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bogor

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan.

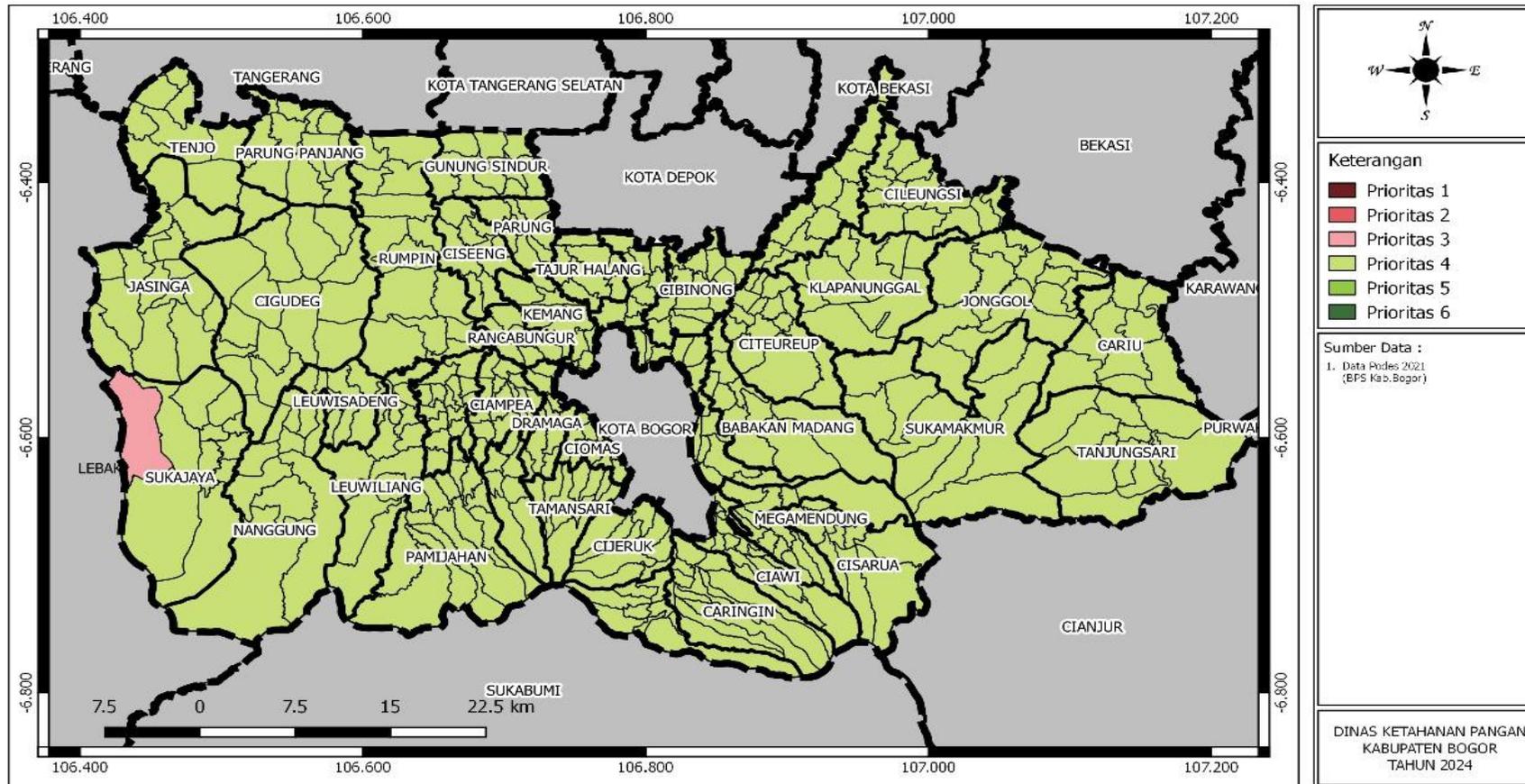
Hasil perbandingan status ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor terdapat 39 desa (9,37%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat dan 1 desa (0,24%) yang mengalami kenaikan sebanyak 2 tingkat. Terdapat 7 desa (1,68%) yang mengalami penurunan 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan prioritas adalah sebanyak 369 desa (88,70%).

Dari total 19 kelurahan, tidak terdapat kelurahan yang mengalami perubahan tingkat prioritas. Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 22.

Tabel 22 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	-1	Tetap	1	2	Total
Babakan Madang	0	9	0	0	9
Bojonggede	0	9	0	0	9
Caringin	0	10	1	1	12
Cariu	1	9	0	0	10
Ciampea	2	10	1	0	13
Ciawi	0	10	3	0	13
Cibinong	0	13	0	0	13
Cibungbulang	0	9	6	0	15
Cigombong	1	7	1	0	9
Cigudeg	0	12	3	0	15
Cijeruk	0	9	0	0	9
Cileungsi	0	12	0	0	12
Ciomas	0	10	1	0	11
Cisarua	0	7	3	0	10
Ciseeng	0	9	1	0	10
Citeureup	0	14	0	0	14
Dramaga	0	9	1	0	10
Gunungputri	0	10	0	0	10
Gunungsindur	0	8	2	0	10
Jasinga	0	12	4	0	16
Jonggol	0	14	0	0	14
Kemang	0	9	0	0	9
Klapanunggal	0	9	0	0	9
Leuwiliang	0	9	2	0	11
Leuwisadeng	0	7	1	0	8
Megamendung	0	11	1	0	12
Nanggung	0	10	1	0	11
Pamijahan	0	14	1	0	15
Parung	0	8	1	0	9
Parungpanjang	0	11	0	0	11
Rancabungur	2	5	0	0	7
Rumpin	0	12	2	0	14
Sukajaya	0	11	0	0	11
Sukamakmur	0	9	1	0	10
Sukaraja	0	12	1	0	13
Tajurhalang	0	7	0	0	7
Tamansari	0	8	0	0	8
Tanjungsari	0	9	1	0	10
Tenjo	0	9	0	0	9
Tenjolaya	1	6	0	0	7
Total	7	388	39	1	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas



Gambar 13 Peta desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai di Kabupaten Bogor

3.2 Indikator Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan tanpa diimbangi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan analisis indikator desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai digunakan data desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai yang bersumber dari data Podes tahun 2021.

Berdasarkan data Podes tahun 2021, di Kabupaten Bogor masih terdapat 2 desa yang termasuk kategori jalan 2 pada Podes (memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali pada saat tertentu), yaitu Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya dan Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap 2 desa tersebut didapatkan hasil bahwa kondisi pada tahun 2023 hanya terdapat 1 desa yang termasuk kategori jalan 2, yaitu Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya. Sementara untuk Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin sudah termasuk kategori jalan 1.

Sehingga pada FSVA tahun 2024 hanya terdapat 1 desa Prioritas 3 atau termasuk kategori jalan 2 pada podes (memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali pada saat tertentu), sedangkan untuk 434 desa/kelurahan lainnya sudah memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 yang dapat dilalui sepanjang tahun.

Adapun desa yang termasuk prioritas 3 tersebut adalah Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Untuk sebaran desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan prioritas disajikan pada tabel 23.

Tabel 23 Sebaran desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan skala prioritas

No.	Prioritas	Kategori Jalan	Jumlah Desa	Jumlah Kel	Total
1	Prioritas 1	4	0	0	0
2	Prioritas 2	3	0	0	0
3	Prioritas 3	2	1	0	1
4	Prioritas 4	1	415	19	434

Keterangan Kategori Jalan:

- a. Dapat dilalui Roda 4 sepanjang tahun.
- b. Dapat dilalui Roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dan lain-lain).
- c. Dapat dilalui Roda 4 sepanjang tahun, kecuali sepanjang musim hujan.
- d. Tidak dapat dilalui Roda 4 sepanjang tahun.

3.2.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 435 desa antara tahun 2023-2024. Berdasarkan hasil analisis pada indikator jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk, jumlah desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) tidak mengalami perubahan antara tahun 2023 dan 2024. 1 Desa prioritas 3 (kategori jalan 2) dan 415 desa prioritas 4 (kategori jalan 1).

Berdasarkan hasil analisis pada indikator jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk, jumlah kelurahan rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) tidak mengalami perubahan antara tahun 2023 dan 2024. 19 kelurahan prioritas 4 (kategori jalan 1). Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 24 berikut.

Tabel 24 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023 - 2024

Prioritas	Kategori Jalan	2023			2024		
		Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	4	0	0	0	0	0	0
2	3	0	0	0	0	0	0
3	2	1	0	1	1	0	1
4	1	415	19	434	415	19	434
Total		416	19	435	416	19	435

BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan, meliputi:

- 1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan
- 2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh.

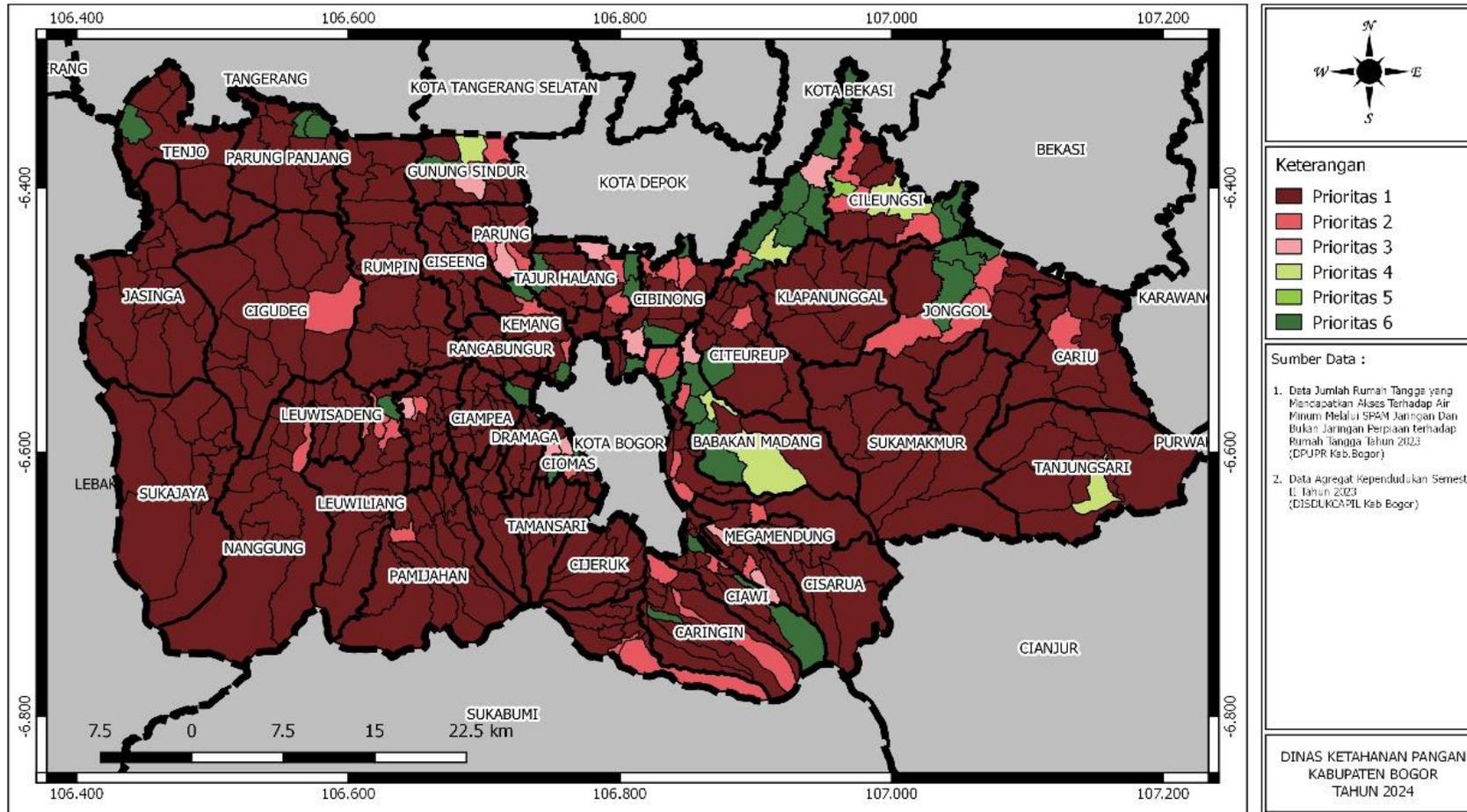
Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan
- 2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) tahun 2024, rata-rata indeks pemanfaatan pangan untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 62,48 *point* dan rata-rata indeks pemanfaatan pangan untuk desa-desa yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 82,08 *point*.

PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KABUPATEN BOGOR



Gambar 14 Peta rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga

4.1 Indikator Rasio Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa/kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga digunakan data di tingkat desa/kelurahan sebagai berikut:

- a. Data jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terhadap Rumah Tangga di Kabupaten Bogor tahun 2023 (DPUPR Kabupaten Bogor); dan
- b. Data jumlah rumah tangga adalah data yang bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Sumber Disdukcapil Kabupaten Bogor).

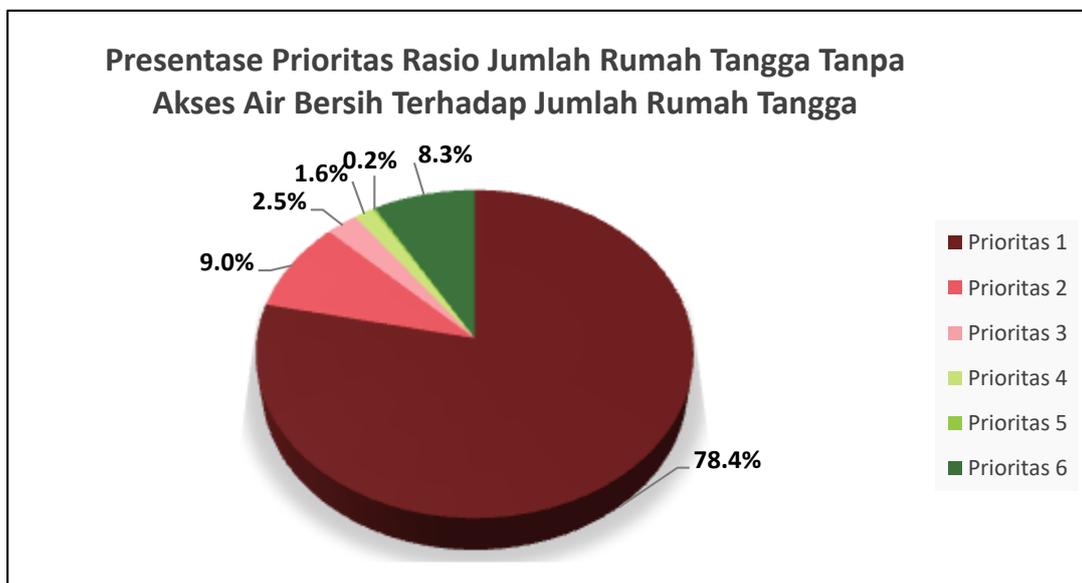
Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata skor rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 25,36 *point* dan rata-rata skor rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 64,57 *point*.

Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga tahun 2024 di Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 25. Sedangkan, persentase rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga disajikan pada gambar 15.

Tabel 25 Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas

No	Prioritas	Range Rasio Akses Air Bersih	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Total
1	Prioritas 1	≥ 0.2234	331	10	341
2	Prioritas 2	0.1290 - 0.2234	35	4	39
3	Prioritas 3	0.0592 - 0.1290	9	2	11
4	Prioritas 4	0.0201 - 0.0592	7	0	7
5	Prioritas 5	0.0067 - 0.0201	1	0	1
6	Prioritas 6	< 0.0067	33	3	36

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990



Gambar 15 Persentase skala prioritas pada rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga

Dari 416 desa, untuk indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga terdapat sebanyak 331 desa (79,6%) masuk prioritas 1, sebanyak 35 desa (8,4%) masuk prioritas 2, sebanyak 9 desa (2,2%) masuk prioritas 3, sebanyak 7 desa (1,7%) masuk prioritas 4, sebanyak 1 desa (0,2%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 33 desa (7,9%) masuk prioritas 6.

Dari 19 desa, untuk indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga terdapat sebanyak 10 kelurahan (52,6%) masuk prioritas 1, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 2, sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 3, tidak ada kelurahan yang masuk prioritas 4, tidak ada kelurahan yang masuk prioritas 5 dan sebanyak 3 kelurahan (15,8%) masuk prioritas 6.

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Bogor, rasio terendah (rasio paling baik) adalah 0,0000 di Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Desa Sukamakmur dan Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas, Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin, Desa Bojongmurni dan Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi, Desa Pasirlaja dan Desa Pasirjambu Kecamatan Sukaraja, Desa Cijayanti, Desa Citaringgul, Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang, Desa Singajaya, Desa Sukamaju, Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol, Desa Cipeucang, Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi, Desa Gunungputri, Bojong Nangka, Cicadas, Wanaherang, Cikeas Udik, Ciangsana, dan Bojong Kulur Kecamatan Gunungputri, Desa Tangkil Kecamatan Citeureup, Kelurahan Nanggewer dan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong, Desa Bojong Baru dan Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede, Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Desa Atang Senjaya dan Jampang Kecamatan Kemang, Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur, Desa Singabraja Kecamatan Tenjo dan Desa Parungpanjang dan Kabasiran Kecamatan Parungpanjang.

Sedangkan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga tertinggi (rasio paling buruk) adalah 0,9099 di Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari.

Dari hasil analisis indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga ada 21 (dua puluh satu) kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tenjolaya. Hal tersebut dikarenakan seluruh desa/kelurahan di 21 wilayah kecamatan tersebut termasuk kedalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1-3). Di samping itu, tidak ada kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya termasuk wilayah tahan pangan (prioritas 4-6).

Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan disajikan pada tabel 26.

Tabel 26 Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Babakan Madang	2	1	1	2	0	3	9
Bojonggede	4	2	1	0	0	2	9
Caringin	9	2	0	0	0	1	12
Cariu	9	1	0	0	0	0	10
Ciampea	13	0	0	0	0	0	13
Ciawi	10	1	0	0	0	2	13
Cibinong	7	3	1	0	0	2	13
Cibungbulang	13	1	1	0	0	0	15
Cigombong	7	2	0	0	0	0	9
Cigudeg	14	1	0	0	0	0	15
Cijeruk	9	0	0	0	0	0	9
Cileungsi	4	3	0	2	1	2	12
Ciomas	6	1	2	0	0	2	11
Cisarua	10	0	0	0	0	0	10
Ciseeng	10	0	0	0	0	0	10
Citeureup	12	1	0	0	0	1	14
Dramaga	9	0	0	0	0	1	10
Gunungputri	0	1	1	1	0	7	10
Gunungsindur	6	1	1	1	0	1	10
Jasinga	16	0	0	0	0	0	16
Jonggol	8	3	0	0	0	3	14
Kemang	5	2	0	0	0	2	9
Klapanunggal	9	0	0	0	0	0	9
Leuwiliang	8	2	0	0	0	1	11

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Leuwisadeng	8	0	0	0	0	0	8
Megamendung	8	2	2	0	0	0	12
Nanggung	10	1	0	0	0	0	11
Pamijahan	14	1	0	0	0	0	15
Parung	5	3	1	0	0	0	9
Parungpanjang	9	0	0	0	0	2	11
Rancabungur	7	0	0	0	0	0	7
Rumpin	14	0	0	0	0	0	14
Sukajaya	11	0	0	0	0	0	11
Sukamakmur	10	0	0	0	0	0	10
Sukaraja	7	4	0	0	0	2	13
Tajurhalang	6	0	0	0	0	1	7
Tamansari	8	0	0	0	0	0	8
Tanjungsari	9	0	0	1	0	0	10
Tenjo	8	0	0	0	0	1	9
Tenjolaya	7	0	0	0	0	0	7
Total	341	39	11	7	1	36	435

4.1.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga per Kecamatan

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 435 desa/kelurahan antara tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil analisis pada indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan, dari total 416 desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 368 desa (88,46%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 375 desa (90,14%) pada FSVA tahun 2024. Desa yang termasuk prioritas 1 meningkat dari 290 (69,71%) menjadi 331 desa (79,56%). Desa yang termasuk prioritas 2 menurun dari 56 (13,46%) menjadi 35 desa (8,41%). Desa yang termasuk prioritas 3 menurun dari 22 (5,28%) menjadi 9 desa (2,16%).

Dari total 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, terdapat peningkatan 15 kelurahan (78,94%) yang termasuk wilayah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) pada FSVA 2023 menjadi 16 kelurahan (84,21%). Terdapat penurunan kelurahan yang termasuk prioritas 1 dari 11 (57,89%) menjadi 10 kelurahan (52,63%). Kelurahan yang termasuk dalam prioritas 2 meningkat dari 1 (5,26%) menjadi 4 kelurahan (21,05%). Kelurahan yang termasuk prioritas 3 menurun dari 3 (15,78%) menjadi 2 kelurahan (10,52%). Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 27 berikut.

Tabel 27 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023-2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	290	11	301	331	10	341
2	56	1	57	35	4	39
3	22	3	25	9	2	11
4	5	0	5	7	0	7
5	2	0	2	1	0	1
6	41	4	45	33	3	36
Total	416	19	435	416	19	435

4.1.2 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan pada Indikator Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bogor

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan.

Hasil perbandingan status ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 66 desa (15,86%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat, 9 desa (2,16%) yang mengalami kenaikan 2 tingkat, 4 desa (0,96%) yang mengalami kenaikan sebanyak 3 tingkat dan 1 desa (0,24%) yang mengalami kenaikan sebanyak 4 tingkat. Terdapat 1 desa (0,24%) yang mengalami penurunan 5 tingkat, 1 desa (0,24%) yang mengalami penurunan 3 tingkat, 2 desa (0,48%) yang mengalami penurunan 2 tingkat dan 3 desa (0,72%) yang mengalami penurunan 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan prioritas adalah sebanyak 329 desa (79,08%).

Untuk sebaran kelurahan, terdapat 1 kelurahan (5,26%) yang mengalami kenaikan sebanyak 3 tingkat, 2 kelurahan (0,48%) yang mengalami kenaikan 1 tingkat, dan 1 kelurahan (5,26%) yang mengalami penurunan sebanyak 1 tingkat. Kelurahan yang tidak mengalami perubahan prioritas adalah sebanyak 15 kelurahan (78,94%). Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 28.

Tabel 28 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	-5	-3	-2	-1	Tetap	1	2	3	4	Total
Babakan Madang	0	0	1	1	3	1	3	0	0	9
Bojonggede	0	0	0	0	7	1	1	0	0	9
Caringin	0	0	0	0	10	2	0	0	0	12
Cariu	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10
Ciampea	0	0	0	0	9	4	0	0	0	13
Ciawi	0	0	0	1	10	2	0	0	0	13
Cibinong	0	0	0	1	9	2	0	1	0	13
Cibungbulang	0	0	0	0	12	2	0	1	0	15
Cigombong	0	0	0	0	6	3	0	0	0	9
Cigudeg	0	0	0	0	12	3	0	0	0	15
Cijeruk	0	0	0	0	8	1	0	0	0	9
Cileungsi	0	0	0	0	5	4	3	0	0	12

Kecamatan	-5	-3	-2	-1	Tetap	1	2	3	4	Total
Ciomas	0	0	0	0	8	3	0	0	0	11
Cisarua	0	0	0	0	10		0	0	0	10
Ciseeng	0	0	0	0	6	4	0	0	0	10
Citeureup	0	0	0	0	13	1	0	0	0	14
Dramaga	0	0	0	0	8	2	0	0	0	10
Gunungputri	0	0	0	0	8	1	0	1	0	10
Gunungsindur	0	0	0	0	7	0	1	1	1	10
Jasinga	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
Jonggol	0	0	0	0	9	5	0	0	0	14
Kemang	0	0	0	0	4	4	1	0	0	9
Klapanunggal	0	0	0	0	5	4	0	0	0	9
Leuwiliang	0	0	0	0	9	2	0	0	0	11
Leuwisadeng	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
Megamendung	0	0	1	1	10	1	0	0	0	12
Nanggung	0	0	0	0	10	1	0	0	0	11
Pamijahan	0	0	0	0	14	1	0	0	0	15
Parung	0	0	0	0	3	5	0	1	0	9
Parungpanjang	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
Rancabungur	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Rumpin	0	0	0	0	13	1	0	0	0	14
Sukajaya	0	0	0	0	10	1	0	0	0	11
Sukamakmur	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10
Sukaraja	0	1	1	1	9	2	1	0	0	13
Tajurhalang	0	0	0	0	6	1	0	0	0	7
Tamansari	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8
Tanjungsari	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
Tenjo	1	0	0	0	7	1	0	0	0	9
Tenjolaya	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Total	1	1	2	4	344	68	9	5	1	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas

4.2 Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk

Rasio jumlah penduduk desa/kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa/kelurahan per tenaga kesehatan dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan yang dimaksud terdiri atas:

1. Dokter umum/spesialis;
2. Dokter gigi;
3. Bidan; dan
4. Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker, dan lain-lain).

Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa/kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa/kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk digunakan data di tingkat desa/kelurahan sebagai berikut:

- a. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Disdukcapil Kabupaten Bogor);
- b. Data jumlah tenaga kesehatan yang bersumber dari Data SDM Puskesmas Tahun 2023 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor); dan
- c. Data luas wilayah desa (Ha) yang bersumber data RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Bappedalitabang Kabupaten Bogor).

Data jumlah tenaga kesehatan yang digunakan merupakan data tenaga kesehatan di setiap Puskesmas yang dijustifikasi dengan cara desa yang berada dalam satu wilayah kerja Puskesmas, jumlah tenaga kesehatan desa/kelurahannya sama dengan jumlah tenaga kesehatan Puskesmasnya.

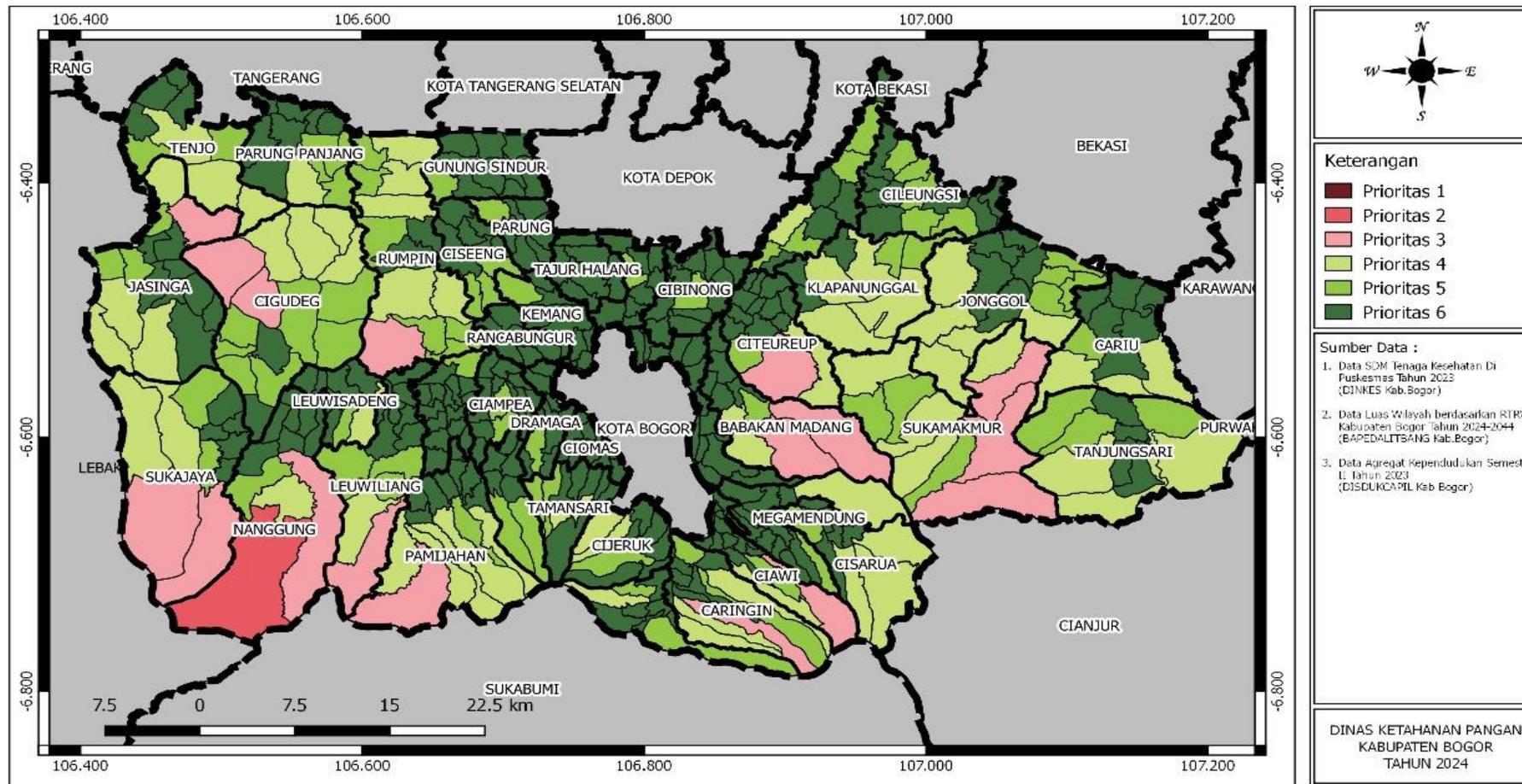
Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata skor rasio jumlah penduduk desa/kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 99,60 *point* dan rata-rata skor rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk untuk desa-desa yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 99,59 *point*.

Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tahun 2024 di Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 29. Sedangkan, persentase rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk disajikan pada gambar 16.

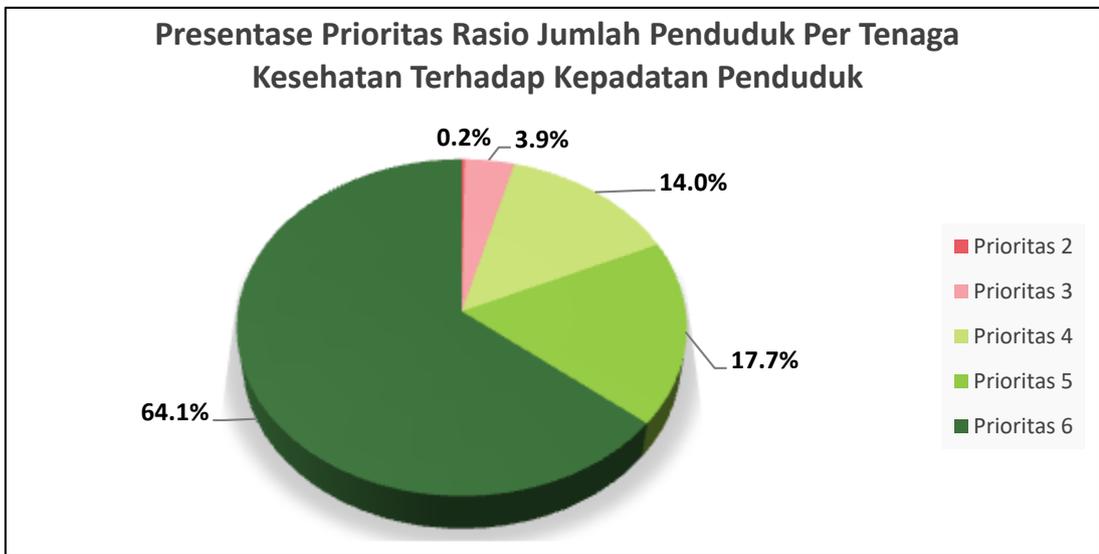
Tabel 29 Sebaran jumlah desa/kelurahan pada rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk berdasarkan skala prioritas

No	Prioritas	Range Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel	Total
1	Prioritas 1	≥ 5.7614	0	0	0
2	Prioritas 2	2.5421 - 5.7614	1	0	1
3	Prioritas 3	1.0735 - 2.5421	17	0	17
4	Prioritas 4	0.4646 - 1.0735	61	0	61
5	Prioritas 5	0.2506 - 0.4646	76	1	77
6	Prioritas 6	< 0.2506	261	18	279

PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK DESA PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KABUPATEN BOGOR



Gambar 16 Peta rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk Kabupaten Bogor



Gambar 17 Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

Dari 416 desa, pada FSVA 2024 tidak ada desa yang termasuk prioritas 1, sebanyak 1 desa (0,2%) masuk prioritas 2, sebanyak 17 desa (4,1%) masuk prioritas 3, sebanyak 61 desa (14,7%) masuk prioritas 4, sebanyak 76 desa (18,3%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 261 desa (62,7%) masuk prioritas 6.

Dari 19 kelurahan, pada FSVA 2024 tidak ada kelurahan yang termasuk prioritas 1, tidak ada kelurahan masuk prioritas 2, tidak ada kelurahan masuk prioritas 3, tidak ada kelurahan masuk prioritas 4, tidak ada kelurahan masuk prioritas 5 dan tidak ada kelurahan masuk prioritas 6.

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor, rasio terendah (rasio paling baik) adalah 0,0237 di Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas, sedangkan rasio tertinggi (rasio paling buruk) adalah 2,5697 di Desa Malasari Kecamatan Nanggung.

Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada tabel 30.

Tabel 30 Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Babakan Madang	0	0	2	1	1	5	9
Bojonggede	0	0	0	0	1	8	9
Caringin	0	0	1	3	2	6	12
Cariu	0	0	0	3	1	6	10
Ciampea	0	0	0	0	2	11	13
Ciawi	0	0	1	1	1	10	13
Cibinong	0	0	0	0	1	12	13
Cibungbulang	0	0	0	0	1	14	15
Cigombong	0	0	0	1	2	6	9

Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Cigudeg	0	0	2	4	7	2	15
Cijeruk	0	0	0	2	1	6	9
Cileungsi	0	0	0	0	5	7	12
Ciomas	0	0	0	0	0	11	11
Cisarua	0	0	0	3	1	6	10
Ciseeng	0	0	0	0	3	7	10
Citeureup	0	0	1	1	1	11	14
Dramaga	0	0	0	0	1	9	10
Gunungputri	0	0	0	1	4	5	10
Gunungsindur	0	0	0	0	1	9	10
Jasinga	0	0	1	4	3	8	16
Jonggol	0	0	0	5	4	5	14
Kemang	0	0	0	0	1	8	9
Klapanunggal	0	0	0	4	2	3	9
Leuwiliang	0	0	1	1	3	6	11
Leuwisadeng	0	0	0	1	1	6	8
Megamendung	0	0	0	1	1	10	12
Nanggung	0	1	1	1	1	7	11
Pamijahan	0	0	1	5	1	8	15
Parung	0	0	0	0	1	8	9
Parungpanjang	0	0	0	1	3	7	11
Rancabungur	0	0	0	0	0	7	7
Rumpin	0	0	1	5	6	2	14
Sukajaya	0	0	2	2	2	5	11
Sukamakmur	0	0	3	4	3	0	10
Sukaraja	0	0	0	0	0	13	13
Tajurhalang	0	0	0	0	0	7	7
Tamansari	0	0	0	1	2	5	8
Tanjungsari	0	0	0	3	3	4	10
Tenjo	0	0	0	3	2	4	9
Tenjolaya	0	0	0	0	2	5	7
Total	0	1	17	61	77	279	435

4.2.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan pada Indikator Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 435 desa antara tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil analisis pada indikator jumlah penduduk per tenaga kesehatan, jumlah desa rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami peningkatan sebanyak 14 (3,36%) desa pada FSVA tahun 2023 menjadi 18 desa (4,32%) pada FSVA tahun 2024. Tidak terdapat desa yang termasuk prioritas 1 pada FSVA 2023 dan 2024. Desa prioritas 2 menurun dari 2 (0,48%) menjadi 1 desa (0,24%). Desa prioritas 3 meningkat dari 12 (2,88%) menjadi 17 desa (4,08%).

Dari total 19 kelurahan, tidak terdapat kelurahan yang termasuk wilayah rentan rawan pangan pada FSVA 2023 dan FSVA 2024. Sebanyak 2 kelurahan (10,52%) yang termasuk prioritas 5 menurun menjadi 1 kelurahan (5,26%). Sebanyak 17 kelurahan (89,47%) yang termasuk prioritas 6 pada FSVA 2023 mengalami kenaikan menjadi 18 kelurahan (94,73%) pada FSVA 2024.

Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 31 berikut:

Tabel 31 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023 – 2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	290	11	301	331	10	341
2	56	1	57	35	4	39
3	22	3	25	9	2	11
4	5	0	5	7	0	7
5	2	0	2	1	0	1
6	41	4	45	33	3	36
Total	416	19	435	416	19	435

4.2.2 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan pada Indikator Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bogor

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan.

Hasil perbandingan prioritas ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 21 desa (5,04%) yang mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat dan 1 desa (0,24%) yang mengalami kenaikan 2 tingkat. Terdapat 1 desa (0,24%) yang mengalami penurunan 2 tingkat dan 22 desa (5,28%) yang mengalami penurunan 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan prioritas adalah sebanyak 371 desa (76,20%).

Untuk kelurahan, sebanyak 1 kelurahan (5,26%) yang mengalami penurunan 1 tingkat dan sebanyak 18 kelurahan (94,73%) tidak mengalami perubahan. Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 32.

Tabel 32 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	-2	-1	Tetap	1	2	Total
Babakan Madang	0	0	9	0	0	9
Bojonggede	0	0	9	0	0	9
Caringin	0	1	9	2	0	12
Cariu	0	0	10	0	0	10
Ciampea	0	0	13	0	0	13
Ciawi	0	1	11	1	0	13
Cibinong	0	1	12	0	0	13
Cibungbulang	0	0	15	0	0	15

Kecamatan	-2	-1	Tetap	1	2	Total
Cigombong	0	1	7	1	0	9
Cigudeg	0	2	12	1	0	15
Cijeruk	0	1	7	1	0	9
Cileungsi	0	0	12	0	0	12
Ciomas	0	0	11	0	0	11
Cisarua	0	2	8	0	0	10
Ciseeng	0	0	10	0	0	10
Citeureup	0	0	14	0	0	14
Dramaga	0	0	9	1	0	10
Gunungputri	0	1	8	1	0	10
Gunungsindur	0	0	10	0	0	10
Jasinga	1	1	12	2	0	16
Jonggol	0	0	14	0	0	14
Kemang	0	0	9	0	0	9
Klapanunggal	0	1	7	1	0	9
Leuwiliang	0	0	0	1	0	11
Leuwisadeng	0	0	0	1	0	8
Megamendung	0	1	11	0	0	12
Nanggung	0	2	9	0	0	11
Pamijahan	0	2	11	2	0	0
Parung	0	0	9	0	0	9
Parungpanjang	0	0	11	0	0	11
Rancabungur	0	0	7	0	0	7
Rumpin	0	2	9	3	0	0
Sukajaya	0	1	7	2	1	11
Sukamakmur	0	0	10	0	0	10
Sukaraja	0	0	13	0	0	13
Tajurhalang	0	0	7	0	0	7
Tamansari	0	0	7	1	0	0
Tanjungsari	0	3	7	0	0	10
Tenjo	0	0	9	0	0	9
Tenjolaya	0	0	7	0	0	7
Total	1	23	389	21	1	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas

4.3 Dampak (*Outcome*) dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, penilaian status gizi anak balita mengacu pada standar antropometri yang didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, yaitu:

1. Berat Badan menurut Umur (BB/U), digunakan untuk menentukan kategori:
 - a. Berat badan sangat kurang;
 - b. Berat badan kurang;
 - c. Berat badan normal; dan

- d. Resiko berat badan lebih.
2. Panjang/tinggi badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), digunakan untuk menentukan kategori:
 - a. Sangat pendek;
 - b. Pendek;
 - c. Normal; dan
 - d. Tinggi.
3. Berat badan menurut panjang/tinggi badan (BB/PB atau BB/TB), digunakan untuk menentukan kategori:
 - a. Gizi buruk;
 - b. Gizi kurang;
 - c. Gizi baik;
 - d. Beresiko gizi lebih;
 - e. Gizi lebih; dan
 - f. Obesitas.
4. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U), digunakan untuk menentukan kategori:
 - a. Gizi buruk;
 - b. Gizi kurang;
 - c. Gizi baik;
 - d. Beresiko gizi lebih;
 - e. Gizi lebih; dan
 - f. Obesitas.

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2023 sebanyak 390 Balita. Jumlah penderita gizi buruk terbanyak selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebanyak 15 balita di Cibungbulang pada tahun 2019. Sementara di tahun 2023, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Dramaga sebanyak 7 balita. Secara total, jumlah gizi buruk cenderung fluktuatif, terbanyak adalah pada tahun 2019, sebanyak 98 Balita dan paling sedikit di tahun 2023, yaitu sebanyak 45 Balita.

Tabel 33 Rekapitulasi penderita gizi buruk tahun 2019-2023

KECAMATAN	PENDERITA GIZI BURUK					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nanggung	3	5	0	0	2	12
Leuwiliang	3	0	8	3	2	18
Leuwisadeng	2	2	12	2	1	18
Pamijahan	8	3	4	7	2	23
Cibungbulang	15	5	0	2	0	28
Ciampea	1	0	1	7	0	11
Tenjolaya	1	0	0	1	4	2
Dramaga	2	2	2	0	7	6
Ciomas	7	4	0	7	0	24
Taman Sari	4	2	1	1	1	9
Cijeruk	1	1	0	1	0	4
Cigombong	0	0	3	0	0	3
Caringin	5	2	3	3	3	13
Ciawi	3	1	0	0	5	7
Cisarua	1	5	0	2	0	17

KECAMATAN	PENDERITA GIZI BURUK					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Megamendung	0	0	2	0	0	2
Sukaraja	1	0	0	2	1	3
Babakan Madang	0	0	4	0	0	6
Sukamakmur	5	0	0	0	0	8
Cariu	1	3	1	0	0	6
Tanjungsari	2	2	0	2	2	8
Jonggol	1	1	2	0	2	6
Cileungsi	1	2	0	2	1	12
Klapanunggal	4	1	0	1	1	8
Gunungputri	4	1	0	0	2	5
Citeureup	1	3	1	0	0	5
Cibinong	1	3	0	5	1	13
Bojonggede	3	5	0	2	0	12
Tajurhalang	5	0	0	0	0	5
Kemang	0	1	0	0	0	1
Rancabungur	0	0	1	0	0	1
Parung	3	0	1	2	1	8
Ciseeng	2	2	2	2	3	11
Gunungsindur	0	0	4	5	1	10
Rumpin	4	0	5	5	1	14
Cigudeg	1	2	2	5	0	13
Sukajaya	1	0	5	2	0	9
Jasinga	0	0	0	7	0	7
Tenjo	1	0	11	1	0	16
Parungpanjang	1	0	0	1	2	6
JUMLAH	98	58	75	80	45	390

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebanyak 75 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 101 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebanyak 54 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 101 jiwa. Angka kematian balita tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Jasinga sebanyak 19 jiwa dan 2023 terdapat di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Sukaraja (masing-masing 4 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga (masing-masing 4 jiwa) dan tahun 2023 di Kecamatan Gunungputri (7 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34 Jumlah kematian balita dan ibu per kecamatan

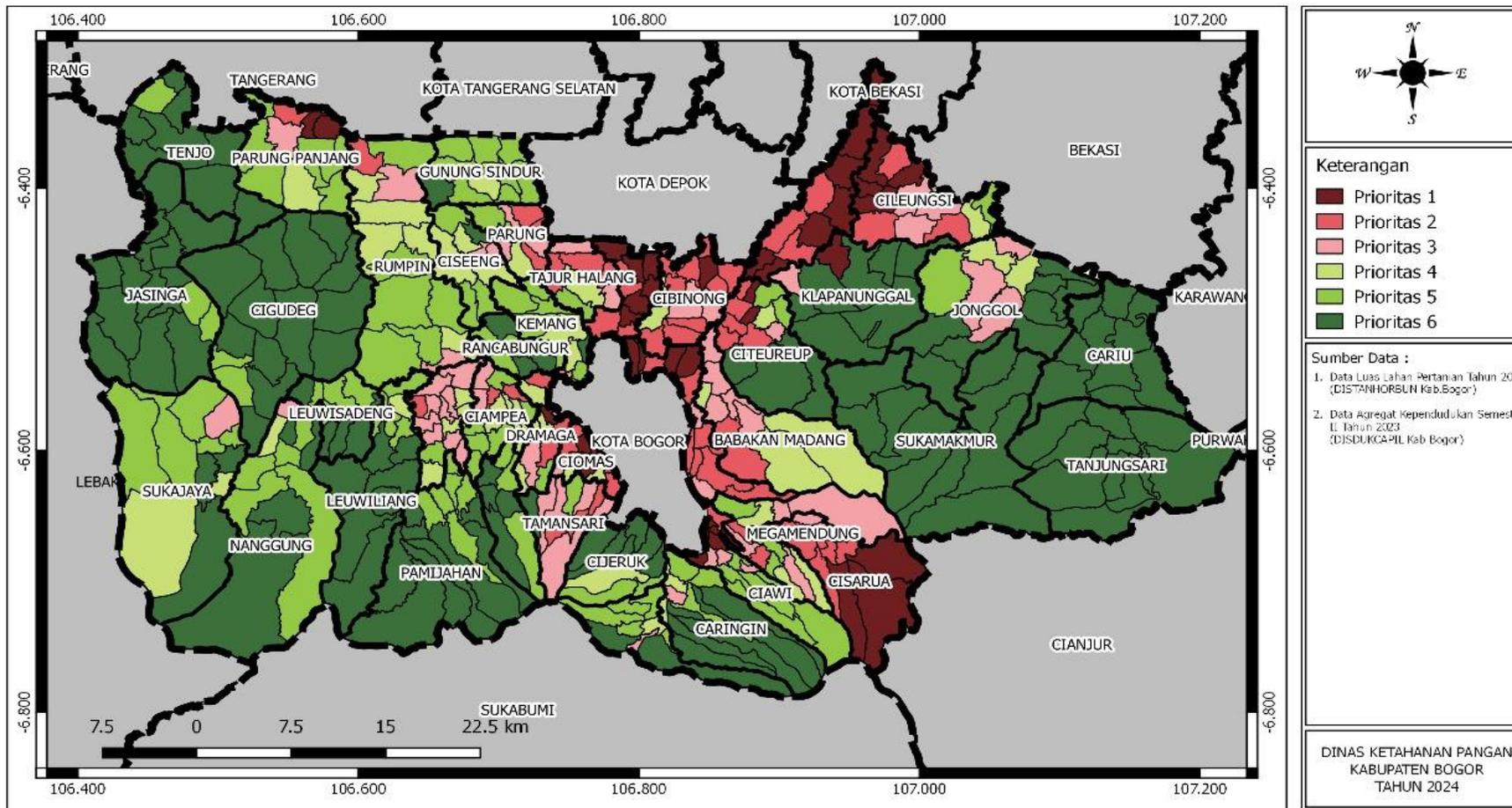
Kecamatan	Kematian Ibu		Kematian Balita	
	2022	2023	2022	2023
Nanggung	1	2	0	3
Leuwiliang	0	3	0	0
Leuwisadeng	2	1	5	2
Pamijahan	4	6	2	2
Cibungbulang	3	3	13	1
Ciampea	4	5	4	3

Kecamatan	Kematian Ibu		Kematian Balita	
	2022	2023	2022	2023
Tenjolaya	1	1	0	0
Dramaga	0	2	0	3
Ciomas	1	5	1	1
Tamansari	1	2	0	4
Cijeruk	2	3	0	1
Cigombong	1	0	0	1
Caringin	0	1	0	2
Ciawi	1	5	0	0
Cisarua	1	1	0	2
Megamendung	0	2	0	0
Sukaraja	0	5	0	4
Babakan Madang	1	1	0	1
Sukamakmur	1	2	0	0
Cariu	0	1	0	1
Tanjungsari	1	0	0	1
Jonggol	2	2	2	1
Cileungsi	1	5	0	2
Klapanunggal	2	4	3	0
Gunungputri	4	7	1	2
Citeureup	4	2	3	3
Cibinong	2	5	1	0
Bojonggede	3	4	2	2
Tajurhalang	2	2	0	0
Kemang	0	3	0	1
Rancabungur	1	1	3	1
Parung	0	0	3	1
Ciseeng	0	0	0	1
Gunungsindur	0	1	2	2
Rumpin	1	2	1	0
Cigudeg	0	3	4	2
Sukajaya	2	2	5	0
Jasinga	4	3	19	0
Tenjo	0	2	1	2
Parungpanjang	1	2	0	0
Jumlah	54	101	75	52

BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 (enam) indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Peta ketahanan dan kerentanan pangan komposit disusun berdasarkan Analisis Pembobotan.

Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah desa/kelurahan prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah desa/kelurahan lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa/kelurahan yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah desa/kelurahan pada prioritas 6 (enam) tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.



Gambar 18 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bogor tahun 2024

5.1 Kondisi Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Pembagian prioritas hasil analisis FSVA Kabupaten Bogor tahun 2024, didasarkan atas titik potong yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2024, rata-rata indeks komposit untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 52,44 *point* dan rata-rata indeks komposit untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 63,63 *point*.

Rendahnya rata-rata indeks komposit, baik yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) maupun rata-rata indeks komposit untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) disebabkan karena rendahnya rata-rata induk indikator rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap rumah tangga dan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana pangan terhadap jumlah rumah tangga. Secara rinci, berikut disajikan hasil analisis prioritas desa/kelurahan berdasarkan tiap indikator dan komposit.

Tabel 35 Hasil analisis FSVA Kabupaten Bogor Tahun 2024 berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	JASINGA	BARENGKOK	6	3	5	4	1	3	82,46	1	6
2	CITEUREUP	TANGKIL	6	3	4	4	6	5	80,98	2	6
3	JASINGA	PANGAUR	6	3	2	4	1	4	78,67	3	6
4	TANJUNGSARI	SINARSARI	6	6	5	4	4	6	75,39	4	6
5	JONGGOL	CIBODAS	6	4	4	4	2	4	74,65	5	6
6	JASINGA	WIRAJAYA	6	1	1	4	1	4	73,92	6	6
7	CARIU	MEKARWANGI	6	4	5	4	1	5	73,07	7	6
8	CARIU	TEGAL PANJANG	6	2	6	4	1	6	72,78	8	6
9	CARIU	SUKAJADI	6	2	6	4	1	6	72,53	9	6
10	GUNUNG SINDUR	GUNUNG SINDUR	5	6	6	4	6	6	72,52	10	6
11	TENJO	SINGABRAJA	6	4	4	4	6	6	72,45	11	6
12	TENJO	BOJONG	6	3	5	4	1	5	72,43	12	6
13	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	1	6	6	4	6	5	71,64	13	6
14	CILEUNGSI	CIPEUCANG	4	5	6	4	6	6	71,62	14	6
15	DRAMAGA	BABAKAN	4	6	5	4	6	6	71,49	15	6
16	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	2	6	6	4	6	4	71,16	16	6
17	CARIU	BANTAR KUNING	6	1	6	4	1	4	71,02	17	6
18	PARUNG PANJANG	GOROWONG	4	6	5	4	1	4	70,81	18	6
19	NANGGUNG	CISARUA	6	6	3	4	1	4	70,76	19	6
20	KLAPANUNGGAL	NAMBO	6	3	5	4	1	4	70,64	20	6
21	CARIU	CIKUTAMAHI	6	4	6	4	1	4	70,55	21	6
22	JASINGA	BAGOANG	6	2	2	4	1	5	70,30	22	6
23	JONGGOL	SIRNAGALIH	6	3	5	4	1	5	70,26	23	6
24	CARIU	CIBATU TIGA	6	1	5	4	1	6	70,26	24	6

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
25	CARIU	BABAKAN RADEN	6	2	5	4	1	6	70,16	25	6
26	KEMANG	ATANG SENJAYA	5	3	6	4	6	6	70,12	26	6
27	KEMANG	PARAKAN JAYA	6	3	6	4	2	6	70,04	27	6
28	CARIU	CARIU	6	4	6	4	2	6	69,96	28	6
29	CARIU	KARYA MEKAR	6	2	4	4	1	4	69,90	29	6
30	JONGGOL	SUKAGALIH	6	1	2	4	1	5	69,88	30	6
31	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	1	5	6	4	6	6	69,76	31	6
32	CILEUNGI	JATISARI	5	3	6	4	6	6	69,57	32	6
33	GUNUNG SINDUR	RAWAKALONG	5	6	6	4	2	6	69,52	33	6
34	GUNUNG PUTRI	CICADAS	1	5	6	4	6	6	69,43	34	6
35	KLAPANUNGGAL	LIGARUKTI	6	3	5	4	1	4	69,42	35	6
36	JONGGOL	SUKAMAJU	4	4	6	4	6	6	69,25	36	6
37	JASINGA	PANGRADIN	6	3	2	4	1	6	69,25	37	6
38	BABAKAN MADANG	CITARINGGUL	3	5	6	4	6	6	69,12	38	6
39	KEMANG	JAMPANG	5	1	6	4	6	6	69,00	39	6
40	CIBINONG	PABUARAN MEKAR	2	4	6	4	6	6	69,00	40	6
41	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	2	5	6	4	4	5	68,92	41	6
42	GUNUNG SINDUR	PENGASINAN	5	1	6	4	4	6	68,82	42	6
43	BOJONG GEDE	BOJONG BARU	1	4	6	4	6	6	68,67	43	6
44	TANJUNGSARI	SINARRASA	6	5	2	4	1	4	68,65	44	6
45	CARIU	KUTAMEKAR	6	1	5	4	1	6	68,59	45	6
46	TENJO	CIOMAS	6	3	2	4	1	4	68,48	46	6
47	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	1	4	6	4	6	6	68,46	47	6
48	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	1	6	6	4	3	5	68,43	48	6
49	JONGGOL	SINGAJAYA	3	4	5	4	6	6	68,39	49	6
50	CILEUNGI	MEKARSARI	3	4	6	4	4	5	68,37	50	6

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
51	CIGOMBONG	WATESJAYA	6	4	4	4	2	5	68,35	51	6
52	KLAPANUNGGAL	LULUT	6	2	3	4	1	6	68,32	52	6
53	TANJUNGSARI	SUKARASA	6	5	2	4	1	5	68,26	53	6
54	TENJO	BABAKAN	6	3	2	4	1	4	68,24	54	6
55	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	1	4	6	4	6	6	68,22	55	6
56	DRAMAGA	CIKARAWANG	2	5	5	4	1	6	68,21	56	6
57	BOJONG GEDE	RAWA PANJANG	1	4	6	4	6	6	68,18	57	6
58	CIOMAS	CIOMAS RAHAYU	1	4	6	4	6	6	68,17	58	6
59	JONGGOL	SUKAMANAH	3	3	6	4	6	6	68,16	59	6
60	CIGUDEG	ARGAPURA	6	6	5	4	1	3	68,14	60	6
61	LEUWILIANG	LEUWILIANG	4	3	5	4	6	6	68,11	61	6
62	BABAKAN MADANG	KADUMANGU	3	3	6	4	6	6	68,04	62	6
63	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	4	5	5	4	3	6	68,02	63	6
64	CILEUNGI	CILEUNGI	1	4	6	4	5	6	68,00	64	6
65	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	6	5	1	4	1	5	68,00	65	6
66	PAMIJAHAN	CIBENING	5	3	4	4	1	6	67,97	66	6
67	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	2	4	6	4	6	6	67,95	67	6
68	CIBINONG	PAKANSARI	3	3	6	4	1	5	67,81	68	5
69	PARUNG	PARUNG	2	6	6	4	2	6	67,75	69	5
70	CIGUDEG	BANYUWANGI	6	2	1	4	1	5	67,70	70	5
71	TANJUNGSARI	SELAWANGI	6	5	5	4	1	5	67,59	71	5
72	CIAWI	BANJAR WANGI	3	5	5	4	1	6	67,57	72	5
73	PARUNG PANJANG	JAGABAYA	5	3	4	4	1	6	67,46	73	5
74	BABAKAN MADANG	BABAKAN MADANG	3	4	6	4	4	6	67,40	74	5
75	TANJUNGSARI	ANTAJAYA	6	4	4	4	1	5	67,23	75	5
76	CARINGIN	PASIR MUNCANG	6	3	2	4	6	6	67,21	76	5

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
77	KLAPANUNGGAL	LEUWIKARET	6	3	2	4	1	4	67,17	77	5
78	CILEUNGI	GANDOANG	3	3	6	4	4	6	67,15	78	5
79	PAMIJAHAN	PURWABAKTI	6	1	1	4	1	3	66,99	79	5
80	TAJUR HALANG	KALISUREN	2	3	6	4	6	6	66,84	80	5
81	CIBINONG	NANGGEWER	2	2	6	4	6	6	66,81	81	5
82	BABAKAN MADANG	CIJAYANTI	2	3	6	4	6	4	66,59	82	5
83	CIGUDEG	CINTAMANIK	6	4	4	4	1	3	66,58	83	5
84	SUKAJAYA	HARKATJAYA	6	1	1	4	1	6	66,46	84	5
85	PARUNG PANJANG	KABASIRAN	1	3	5	4	6	6	66,31	85	5
86	LEUWISADENG	SIBANTENG	5	4	3	4	1	6	66,28	86	5
87	CARINGIN	TANGKIL	6	3	1	4	1	3	66,16	87	5
88	TANJUNGSARI	TANJUNG RASA	6	5	5	4	1	6	66,05	88	5
89	CIBUNGBULANG	GALUGA	2	5	4	4	3	6	65,89	89	5
90	JASINGA	PAMAGERSARI	6	6	6	4	1	6	65,88	90	5
91	CIAWI	BANJAR WARU	1	5	3	4	6	6	65,71	91	5
92	LEUWILIANG	PURASEDA	6	3	1	4	1	4	65,65	92	5
93	LEUWISADENG	KALONG II	5	6	1	4	1	6	65,60	93	5
94	JONGGOL	WENINGGALIH	6	2	5	4	1	5	65,56	94	5
95	LEUWISADENG	SADENG	5	5	2	4	1	6	65,55	95	5
96	SUKARAJA	PASIR JAMBU	2	3	5	4	6	6	65,50	96	5
97	PARUNG PANJANG	PARUNG PANJANG	1	1	5	4	6	6	65,40	97	5
98	PAMIJAHAN	CIASIHAN	6	4	1	4	1	4	65,39	98	5
99	TAMANSARI	SUKARESMI	5	1	3	4	1	6	65,29	99	5
100	CISARUA	CIBEUREUM	1	3	4	4	1	4	65,25	100	5
101	CISARUA	BATU LAYANG	2	5	3	4	1	6	65,23	101	5
102	CISARUA	TUGU SELATAN	1	3	4	4	1	4	65,14	102	5

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
103	TENJO	SINGABANGSA	6	2	5	4	1	6	65,05	103	5
104	CIAWI	BOJONG MURNI	5	3	3	4	6	3	64,90	104	5
105	CISARUA	JOGJOGAN	3	4	3	4	1	6	64,88	105	5
106	BABAKAN MADANG	SENTUL	3	3	6	4	3	6	64,85	106	5
107	PARUNG	JABON MEKAR	2	5	6	4	2	6	64,79	107	5
108	SUKARAJA	PASIRLAJA	2	2	4	4	6	6	64,76	108	5
109	CIOMAS	CIAPUS	2	3	6	4	3	6	64,74	109	5
110	LEUWILIANG	LEUWIMEKAR	5	4	5	4	2	6	64,72	110	5
111	CIAWI	BANJAR SARI	5	5	5	4	2	6	64,69	111	5
112	CIBUNGBULANG	CIARUTEN ILIR	3	3	3	4	1	5	64,50	112	5
113	NANGGUNG	BANTAR KARET	5	3	2	4	1	3	64,46	113	5
114	CIBINONG	KARADENAN	2	3	6	4	3	6	64,43	114	5
115	LEUWISADENG	BABAKAN SADENG	5	5	1	4	1	6	64,43	115	5
116	CIOMAS	PADASUKA	1	4	6	4	3	6	64,39	116	5
117	PAMIJAHAN	CIBUNIAN	6	1	1	4	1	4	64,38	117	5
118	TANJUNGSARI	PASIR TANJUNG	6	5	4	4	1	6	64,25	118	5
119	NANGGUNG	MALASARI	6	5	1	4	1	2	64,21	119	5
120	CIOMAS	SUKAMAKMUR	4	3	3	4	6	6	64,13	120	5
121	SUKAMAKMUR	SUKARESMI	6	1	5	4	1	4	63,99	121	5
122	BOJONG GEDE	BOJONG GEDE	1	5	6	4	2	6	63,87	122	5
123	CILEUNGI	CILEUNGI KIDUL	1	4	6	4	2	6	63,59	123	5
124	JONGGOL	BENDUNGAN	6	2	4	4	1	5	63,57	124	5
125	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	1	3	6	4	3	6	63,44	125	5
126	CIGUDEG	WARGAJAYA	6	4	2	4	1	6	63,40	126	5
127	CIGUDEG	BANYUASIH	6	2	1	4	2	5	63,25	127	5
128	TANJUNGSARI	BUANAJAYA	6	4	1	4	1	4	63,24	128	5

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
129	SUKARAJA	CIMANDALA	1	3	6	4	2	6	63,16	129	5
130	JONGGOL	JONGGOL	4	3	5	4	2	6	63,12	130	5
131	BABAKAN MADANG	CIPAMBUAN	4	4	4	4	2	6	63,03	131	5
132	NANGGUNG	CURUG BITUNG	5	3	1	4	1	5	62,95	132	5
133	BOJONG GEDE	PABUARAN	1	4	6	4	2	6	62,78	133	5
134	GUNUNG PUTRI	KARANGGAN	1	4	6	4	2	5	62,77	134	5
135	CITEUREUP	TARIKOLOT	4	2	6	4	2	6	62,62	135	5
136	CILEUNGI	LIMUSNUNGGAL	1	3	6	4	2	6	62,49	136	5
137	MEGAMENDUNG	SUKAKARYA	5	4	1	4	1	6	62,48	137	5
138	CIGUDEG	RENGASJAJAR	6	6	3	4	1	4	62,43	138	4
139	KEMANG	PONDOK UDIK	5	1	6	4	2	6	62,32	139	4
140	TENJO	TAPOS	6	3	1	4	1	4	62,23	140	4
141	JASINGA	JASINGA	6	1	4	4	1	6	62,22	141	4
142	TANJUNGSARI	CIBADAK	6	5	1	4	1	4	62,14	142	4
143	CIAMPEA	BOJONG RANGKAS	2	6	4	4	1	6	62,14	143	4
144	LEUWISADENG	SADENKOLOT	6	2	1	4	1	5	62,04	144	4
145	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	4	3	2	4	4	3	61,82	145	4
146	LEUWILIANG	CIBEBER I	5	3	4	4	2	6	61,76	146	4
147	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	6	3	6	4	1	4	61,75	147	4
148	CILEUNGI	SITUSARI	2	1	6	4	2	5	61,66	148	4
149	KEMANG	TEGAL	5	2	5	4	1	5	61,66	149	4
150	PARUNG	IWUL	4	3	2	4	3	6	61,64	150	4
151	SUKAMAKMUR	SUKAMULYA	6	1	2	4	1	4	61,60	151	4
152	CILEUNGI	MAMPIR	3	3	6	4	1	5	61,59	152	4
153	CIAMPEA	BENTENG	5	5	4	4	1	6	61,50	153	4
154	CIGUDEG	BANGUNJAYA	6	5	2	4	1	4	61,45	154	4

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
155	JASINGA	NEGLASARI	6	3	3	4	1	6	61,45	155	4
156	MEGAMENDUNG	CIPAYUNG GIRANG	3	4	3	4	2	6	61,40	156	4
157	CILEUNGI	DAYEUH	2	3	6	4	1	6	61,37	157	4
158	CIGOMBONG	CIGOMBONG	3	3	5	4	2	6	61,36	158	4
159	CIAMPEA	CIBUNTU	5	4	4	4	1	6	61,36	159	4
160	MEGAMENDUNG	GADOG	2	4	2	4	3	6	61,35	160	4
161	BABAKAN MADANG	SUMUR BATU	3	3	6	4	1	5	61,33	161	4
162	JONGGOL	SINGASARI	5	2	6	4	1	4	61,31	162	4
163	JASINGA	TEGALWANGI	6	5	1	4	1	5	61,24	163	4
164	CIBINONG	HARAPAN JAYA	2	2	6	4	2	6	61,20	164	4
165	JONGGOL	SUKASIRNA	3	1	5	4	2	6	61,04	165	4
166	SUKARAJA	CIJUJUNG	1	3	5	4	2	6	61,03	166	4
167	CIBINONG	PABUARAN	1	2	6	4	2	6	60,97	167	4
168	CIGOMBONG	SROGOL	5	3	5	4	1	6	60,95	168	4
169	SUKAMAKMUR	WARGAJAYA	6	1	4	4	1	5	60,93	169	4
170	CIOMAS	PAGELARAN	1	3	5	4	2	6	60,85	170	4
171	JASINGA	CURUG	6	1	1	4	1	4	60,83	171	4
172	CIBINONG	PONDOK RAJEG	2	2	6	4	2	6	60,78	172	4
173	TENJOLAYA	TAPOS I	6	3	3	4	1	5	60,76	173	4
174	CIBUNGBULANG	CEMLANG	3	4	5	4	1	6	60,67	174	4
175	JONGGOL	SUKANEGARA	6	3	4	4	1	4	60,65	175	4
176	PAMIJAHAN	GUNUNG BUNDER 1	6	5	4	4	1	6	60,59	176	4
177	CISEENG	CIBENTANG	4	4	4	4	1	6	60,47	177	4
178	PARUNG	PAMAGER SARI	3	4	6	4	1	6	60,43	178	4
179	CARINGIN	LEMAH DUHUR	5	3	4	4	1	6	60,34	179	4
180	KLAPANUNGGAL	BOJONG	6	4	6	4	1	5	60,29	180	4

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
181	CIGUDEG	BATUJAJAR	6	4	3	4	1	4	60,28	181	4
182	CARINGIN	CARINGIN	3	3	5	4	1	6	60,23	182	4
183	CIBUNGBULANG	DUKUH	3	4	3	4	2	6	60,20	183	4
184	GUNUNG SINDUR	PADURENAN	5	3	6	4	1	6	60,18	184	4
185	CIGOMBONG	CIBURUY	4	3	5	4	1	6	60,11	185	4
186	CARINGIN	CIMANDE	6	3	1	4	2	5	60,07	186	4
187	CIBINONG	SUKAHATI	4	3	6	4	1	6	60,01	187	4
188	SUKARAJA	CIBANON	3	3	3	4	2	6	59,98	188	4
189	KLAPANUNGGAL	KEMBANG KUNING	1	1	6	4	1	6	59,94	189	4
190	PARUNG	BOJONG SEMPU	3	4	3	4	2	6	59,91	190	4
191	CISARUA	CISARUA	2	6	5	4	1	6	59,89	191	4
192	KEMANG	KEMANG	4	2	6	4	1	6	59,80	192	4
193	CIAWI	PANDANSARI	2	5	5	4	1	6	59,74	193	4
194	CIAMPEA	CIAMPEA UDIK	5	4	4	4	1	6	59,67	194	4
195	GUNUNG SINDUR	PABUARAN	5	3	6	4	1	6	59,66	195	4
196	KLAPANUNGGAL	BANTAR JATI	3	3	5	4	1	6	59,62	196	4
197	MEGAMENDUNG	SUKARESMI	4	4	1	4	3	6	59,61	197	4
198	GUNUNG SINDUR	JAMPANG	6	1	4	4	1	5	59,54	198	4
199	KEMANG	BOJONG	4	2	5	4	1	6	59,52	199	4
200	KEMANG	SEMLAK BARAT	3	2	5	4	1	6	59,46	200	4
201	TANJUNGSARI	TANJUNG SARI	6	4	3	4	1	6	59,44	201	4
202	TENJO	TENJO	5	2	6	4	1	6	59,40	202	4
203	CIAWI	CIAWI	1	4	5	4	1	6	59,36	203	4
204	PARUNG	WARUJAYA	3	4	5	4	1	6	59,36	204	4
205	SUKAJAYA	URUG	4	2	1	4	1	6	59,30	205	4
206	CIAMPEA	CIBADAK	3	3	5	4	1	6	59,30	206	4

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
207	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	6	1	6	4	1	5	59,26	207	4
208	TENJOLAYA	TAPOS II	6	3	3	4	1	6	59,24	208	4
209	CISEENG	PARIGI MEKAR	3	4	5	4	1	6	59,21	209	4
210	SUKAMAKMUR	SUKAMAKMUR	6	2	3	4	1	5	59,18	210	4
211	CARINGIN	MUARA JAYA	4	3	6	4	1	6	59,16	211	4
212	NANGGUNG	SUKALUYU	6	4	1	4	2	6	59,13	212	4
213	PARUNG	WARU	2	4	6	4	1	6	59,09	213	4
214	GUNUNG SINDUR	CURUG	5	3	6	4	1	6	59,06	214	4
215	CIGOMBONG	TUGU JAYA	6	4	3	4	1	6	59,02	215	4
216	CIBINONG	CIRIMEKAR	2	5	6	4	1	6	58,97	216	4
217	CISEENG	CISEENG	3	4	4	4	1	6	58,93	217	4
218	JASINGA	JUGALAJAYA	6	4	1	4	1	4	58,91	218	4
219	RANCABUNBUR	CANDALI	6	4	4	4	1	6	58,84	219	4
220	CITEUREUP	SANJA	2	3	5	4	1	6	58,80	220	4
221	TAJUR HALANG	TAJUR HALANG	4	3	6	4	1	6	58,76	221	4
222	RUMPIN	SUKAMULYA	5	1	6	4	1	4	58,74	222	4
223	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	5	4	1	4	2	5	58,68	223	4
224	CIGUDEG	CIGUDEG	6	5	4	4	1	5	58,67	224	4
225	CIBUNGBULANG	GIRIMULYA	4	4	4	4	1	6	58,46	225	4
226	CIBUNGBULANG	CIBATOK 1	4	4	4	4	1	6	58,36	226	4
227	TENJOLAYA	GUNUNG MALANG	5	1	5	4	1	5	58,33	227	4
228	PARUNG	COGREG	5	2	6	4	1	5	58,31	228	4
229	DRAMAGA	CIHERANG	2	4	4	4	1	6	58,10	229	4
230	MEGAMENDUNG	SUKAMANAH	5	4	2	4	2	6	57,90	230	4
231	CIOMAS	CIOMAS	2	3	4	4	1	6	57,87	231	4
232	CIJERUK	SUKAHARJA	6	1	3	4	1	4	57,86	232	4

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
233	PARUNG PANJANG	DAGO	5	3	5	4	1	5	57,86	233	4
234	PAMIJAHAN	CIBITUNG WETAN	6	1	2	4	1	6	57,86	234	4
235	CIAWI	BENDUNGAN	1	4	6	4	1	6	57,84	235	4
236	CISEENG	KARIHKIL	5	3	3	4	1	5	57,79	236	4
237	CARINGIN	CINAGARA	6	4	4	4	1	4	57,76	237	4
238	LEUWILIANG	BARENGKOK	6	1	3	4	1	6	57,74	238	4
239	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	2	6	6	4	1	6	57,66	239	4
240	CIGUDEG	BANYURESMI	6	3	3	4	1	5	57,59	240	4
241	CARINGIN	PASIR BUNCIR	6	4	2	4	1	4	57,57	241	4
242	DRAMAGA	DRAMAGA	1	3	5	4	1	6	57,49	242	4
243	CIGUDEG	SUKARAKSA	6	2	1	4	1	6	57,46	243	4
244	TAJUR HALANG	CITAYAM	3	2	5	4	1	6	57,41	244	4
245	CISEENG	CIBEUTEUNG UDIK	5	4	5	4	1	5	57,40	245	4
246	CILEUNGI	PASIR ANGIN	2	4	6	4	1	5	57,39	246	4
247	TENJO	BATOK	6	2	5	4	1	5	57,39	247	4
248	LEUWISADENG	WANGUN JAYA	6	5	2	4	1	6	57,35	248	4
249	CIAWI	BITUNG SARI	1	4	3	4	1	6	57,32	249	4
250	CIAMPEA	CIBANTENG	2	3	5	4	1	6	57,22	250	4
251	BOJONG GEDE	SUSUKAN	2	4	5	4	1	5	57,20	251	4
252	CITEUREUP	PUSPANEGARA	1	1	6	4	1	6	57,09	252	4
253	PAMIJAHAN	CIMAYANG	5	5	4	4	1	6	57,04	253	4
254	CITEUREUP	PUSPASARI	2	2	6	4	1	6	57,04	254	4
255	CITEUREUP	KARANG ASEM BARAT	2	1	6	4	1	6	57,00	255	4
256	SUKARAJA	SUKATANI	2	3	2	4	2	6	56,94	256	4
257	CISEENG	KURIPAN	5	3	3	4	1	6	56,92	257	4
258	CIAMPEA	CIAMPEA	3	3	3	4	1	6	56,90	258	4

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
259	CITEUREUP	SUKAHATI	2	3	5	4	1	6	56,89	259	4
260	BABAKAN MADANG	KARANG TENGAH	4	3	5	4	1	3	56,83	260	4
261	CIAMPEA	TEGAL WARU	4	5	4	4	1	5	56,76	261	4
262	CITEUREUP	LEUWINUTUG	2	4	6	4	1	6	56,73	262	4
263	JONGGOL	SUKAJAYA	6	1	1	4	1	4	56,71	263	4
264	CISARUA	LEUWIMALANG	2	5	5	4	1	6	56,49	264	4
265	CIBUNGBULANG	CIARUTEN UDIK	3	3	4	4	1	6	56,49	265	4
266	CISEENG	CIHOWE	6	5	1	4	1	6	56,42	266	4
267	CIOMAS	LALADON	2	2	5	4	1	6	56,16	267	4
268	PAMIJAHAN	GUNUNG BUNDER II	6	2	3	4	1	4	56,11	268	3
269	CIOMAS	PARAKAN	4	4	3	4	1	6	56,07	269	3
270	CIBINONG	CIBINONG	3	5	6	4	1	6	56,07	270	3
271	CITEUREUP	HAMBALANG	6	1	4	4	1	3	56,05	271	3
272	LEUWISADENG	LEUWISADENG	6	5	3	4	1	4	56,00	272	3
273	TAJUR HALANG	TONJONG	5	3	6	4	1	6	55,97	273	3
274	MEGAMENDUNG	SUKAGALIH	3	4	2	4	1	6	55,95	274	3
275	LEUWILIANG	KAREHKEL	5	3	3	4	1	6	55,93	275	3
276	DRAMAGA	SUKAWENING	2	4	2	4	1	6	55,91	276	3
277	DRAMAGA	NEGLASARI	4	5	2	4	1	6	55,90	277	3
278	RANCABUNGUR	RANCABUNGUR	5	3	5	4	1	6	55,86	278	3
279	TENJOLAYA	CIBITUNG TENGAH	6	4	5	4	1	6	55,85	279	3
280	GUNUNG SINDUR	CIBADUNG	5	2	5	4	1	6	55,84	280	3
281	CIGUDEG	MEKARJAYA	6	3	4	4	1	5	55,83	281	3
282	CIBUNGBULANG	CIMANGGU 1	3	4	2	4	1	6	55,77	282	3
283	SUKAJAYA	PASIR MADANG	5	4	6	4	1	4	55,65	283	3
284	RUMPIN	MEKARJAYA	3	1	3	4	1	5	55,64	284	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
285	TENJOLAYA	GUNUNG MULYA	6	1	3	4	1	6	55,64	285	3
286	CITEUREUP	CITEUREUP	5	3	6	4	1	6	55,63	286	3
287	KEMANG	PABUARAN	5	1	5	4	1	6	55,60	287	3
288	CIJERUK	TANJUNG SARI	6	1	2	4	1	6	55,58	288	3
289	CIAMPEA	CIHIDEUNG UDIK	4	3	6	4	1	6	55,57	289	3
290	RUMPIN	KAMPUNG SAWAH	5	2	5	4	1	6	55,54	290	3
291	CITEUREUP	TAJUR	6	1	4	4	1	4	55,52	291	3
292	CIBUNGBULANG	SITU ILIR	5	4	3	4	1	6	55,49	292	3
293	TAMANSARI	PASIR EURIH	3	2	3	4	1	6	55,45	293	3
294	PAMIJAHAN	CIBITUNG KULON	6	5	1	4	2	6	55,42	294	3
295	CISARUA	CITEKO	2	4	4	4	1	6	55,38	295	3
296	TENJO	CILAKU	6	1	3	4	1	6	55,27	296	3
297	CIBUNGBULANG	CIBATOK 2	3	4	3	4	1	6	55,26	297	3
298	SUKAMAKMUR	SUKADAMAI	6	1	3	4	1	3	55,25	298	3
299	PAMIJAHAN	PAMIJAHAN	5	4	3	4	1	6	55,21	299	3
300	CIGUDEG	TEGALLEGA	6	2	1	4	1	4	55,16	300	3
301	SUKAMAKMUR	PABUARAN	6	1	2	4	1	4	55,16	301	3
302	DRAMAGA	PURWASARI	4	5	4	4	1	6	55,13	302	3
303	PARUNG PANJANG	CIBUNAR	2	4	4	4	1	6	55,12	303	3
304	PAMIJAHAN	PASAREAN	5	6	2	4	1	6	55,10	304	3
305	SUKAJAYA	JAYARAHARJA	5	2	1	4	1	6	55,06	305	3
306	BOJONG GEDE	KEDUNG WARINGIN	1	5	6	4	1	6	55,05	306	3
307	CIGUDEG	SUKAMAJU	5	4	3	4	1	5	55,03	307	3
308	CIGOMBONG	CISALADA	5	5	2	4	1	6	54,93	308	3
309	SUKAJAYA	KIARASARI	6	4	1	4	1	3	54,92	309	3
310	CIAMPEA	CIHIDEUNG ILIR	5	4	4	4	1	6	54,89	310	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
311	SUKAMAKMUR	SIRNAJAYA	6	1	1	4	1	4	54,65	311	3
312	TAJUR HALANG	NANGGERANG	2	2	6	4	1	6	54,62	312	3
313	CITEUREUP	KARANG ASEM TIMUR	1	2	6	4	1	6	54,61	313	3
314	CIBINONG	CIRIUNG	2	4	6	4	1	6	54,59	314	3
315	NANGGUNG	NANGGUNG	5	3	4	4	1	6	54,57	315	3
316	JONGGOL	BALEKAMBANG	6	1	4	4	1	4	54,55	316	3
317	TAMANSARI	SUKAJADI	6	3	2	4	1	5	54,55	317	3
318	CIBUNGBULANG	LEUWEUNG KOLOT	4	4	1	4	1	6	54,40	318	3
319	SUKARAJA	CILEBUT TIMUR	1	2	5	4	1	6	54,38	319	3
320	CIBUNGBULANG	CIMANGGU 2	3	4	3	4	1	6	54,38	320	3
321	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	2	5	6	4	1	6	54,31	321	3
322	RANCABUNGUR	MEKARSARI	5	1	3	4	1	6	54,31	322	3
323	CIAWI	TELUK PINANG	3	5	5	4	1	6	54,30	323	3
324	CIJERUK	WARUNG MENTENG	5	4	1	4	1	6	54,29	324	3
325	PARUNG	BOJONG INDAH	5	1	5	4	1	6	54,28	325	3
326	RANCABUNGUR	BANTARJAYA	6	3	4	4	1	6	54,20	326	3
327	RUMPIN	LEUWIBATU	5	1	3	4	1	3	54,16	327	3
328	SUKARAJA	CILEBUT BARAT	1	2	6	4	1	6	54,15	328	3
329	CARINGIN	CIDERUM	5	3	3	4	1	6	54,02	329	3
330	GUNUNG SINDUR	CIDOKOM	5	2	6	4	1	6	53,99	330	3
331	TENJOLAYA	CINANGNENG	5	4	3	4	1	6	53,91	331	3
332	CIGUDEG	BUNAR	5	4	2	4	1	5	53,79	332	3
333	PAMIJAHAN	CIASMARA	6	3	1	4	1	4	53,75	333	3
334	CIAMPEA	BOJONG JENGKOL	4	5	3	4	1	6	53,75	334	3
335	SUKARAJA	CADAS NGAMPAR	3	3	5	4	1	6	53,72	335	3
336	CISARUA	CILEMBER	3	4	3	4	1	6	53,71	336	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
337	RUMPIN	CIDOKOM	4	1	4	4	1	5	53,59	337	3
338	CITEUREUP	PASIR MUKTI	3	1	5	4	1	6	53,54	338	3
339	CIAMPEA	CICADAS	5	4	3	4	1	6	53,52	339	3
340	RANCABUNGUR	PASIR GAOK	6	1	4	4	1	6	53,48	340	3
341	TAJUR HALANG	SASAK PANJANG	2	2	6	4	1	6	53,47	341	3
342	CITEUREUP	GUNUNG SARI	5	1	5	4	1	6	53,43	342	3
343	DRAMAGA	PETIR	3	6	5	4	1	5	53,43	343	3
344	CIAWI	CITAPEN	5	3	2	4	1	6	53,42	344	3
345	CISEENG	BABAKAN	4	3	5	4	1	5	53,40	345	3
346	NANGGUNG	PARAKAN MUNCANG	4	4	5	4	1	6	53,36	346	3
347	CILEUNGI	CIPENJO	1	5	6	4	1	5	53,25	347	3
348	CISEENG	PUTAT NUTUG	4	4	3	4	1	6	53,24	348	3
349	RUMPIN	SUKASARI	4	1	4	4	1	4	53,17	349	3
350	PARUNG PANJANG	PINGKU	5	1	2	4	1	5	53,15	350	3
351	CISEENG	CIBEUTEUNG MUARA	4	4	1	4	1	6	53,11	351	3
352	CIOMAS	MEKARJAYA	2	2	5	4	1	6	53,11	352	3
353	MEGAMENDUNG	CIPAYUNG	4	4	2	4	1	6	53,06	353	3
354	RUMPIN	CIPINANG	4	1	6	4	1	5	52,99	354	3
355	CIJERUK	PALASARI	6	3	1	4	1	6	52,94	355	3
356	CIAMPEA	CINANGKA	5	4	4	4	1	5	52,92	356	3
357	MEGAMENDUNG	MEGAMENDUNG	3	4	2	4	1	4	52,91	357	3
358	RANCABUNGUR	BANTARSARI	5	1	5	4	1	6	52,86	358	3
359	BOJONG GEDE	WARINGIN JAYA	2	4	5	4	1	6	52,86	359	3
360	CIGOMBONG	PASIRJAYA	5	4	1	4	1	4	52,81	360	3
361	CARINGIN	PANCAWATI	6	4	2	4	1	4	52,79	361	3
362	RUMPIN	RUMPIN	4	1	6	4	1	6	52,73	362	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
363	CIGOMBONG	CIBURAYUT	5	3	1	4	1	5	52,60	363	3
364	JASINGA	SIPAK	5	3	1	4	1	6	52,59	364	3
365	RUMPIN	TAMANSARI	3	1	5	4	1	4	52,59	365	3
366	TAMANSARI	TAMAN SARI	2	1	4	4	1	4	52,58	366	3
367	TAMANSARI	SIRNAGALIH	2	1	4	4	1	6	52,40	367	3
368	SUKARAJA	GUNUNG GEULIS	2	3	4	4	1	6	52,40	368	3
369	RUMPIN	GOBANG	5	2	3	4	1	5	52,21	369	3
370	CIBINONG	TENGAH	2	4	6	4	1	6	52,20	370	3
371	RUMPIN	MEKARSARI	2	1	2	4	1	5	51,93	371	3
372	RUMPIN	CIBODAS	5	1	2	4	1	4	51,89	372	3
373	MEGAMENDUNG	SUKAMAJU	2	4	1	4	1	6	51,87	373	3
374	CISARUA	TUGU UTARA	1	5	4	4	1	4	51,77	374	3
375	JASINGA	CIKOPOMAYAK	6	1	3	4	1	6	51,67	375	3
376	CIJERUK	TAJUR HALANG	6	1	1	4	1	4	51,63	376	3
377	CIBUNGBULANG	SITU UDIK	4	5	1	4	1	6	51,60	377	3
378	CISARUA	KOPO	2	3	4	4	1	5	51,59	378	3
379	CIGOMBONG	CIADEG	5	5	2	4	1	6	51,54	379	3
380	TAJUR HALANG	SUKMAJAYA	3	3	5	4	1	6	51,48	380	3
381	TENJOLAYA	SITU DAUN	5	1	4	4	1	6	51,36	381	3
382	CIAWI	CIBEDUG	5	3	1	4	1	5	51,31	382	3
383	SUKAMAKMUR	CIBADAK	6	1	1	4	1	5	51,31	383	3
384	PAMIJAHAN	GUNUNG MENYAN	5	4	1	4	1	6	51,26	384	3
385	JASINGA	KOLEANG	6	3	1	4	1	5	51,17	385	3
386	CIBUNGBULANG	SUKAMAJU	3	4	1	4	1	6	51,17	386	3
387	SUKARAJA	SUKARAJA	2	3	4	4	1	6	51,11	387	3
388	JASINGA	SETU	6	2	3	4	1	6	51,09	388	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
389	CARINGIN	CIMANDE HILIR	4	3	1	4	1	6	51,09	389	3
390	SUKAMAKMUR	SUKAHARJA	6	1	1	4	1	3	51,07	390	3
391	RUMPIN	KERTAJAYA	4	1	4	4	1	5	51,06	391	3
392	CIAWI	CILEUNGI	5	4	1	4	1	4	50,92	392	3
393	LEUWILIANG	CIBEBER II	6	1	2	4	1	6	50,84	393	3
394	LEUWILIANG	KARACAK	6	2	1	4	1	5	50,80	394	3
395	LEUWILIANG	PABANGBON	6	3	1	4	1	5	50,79	395	3
396	DRAMAGA	SINARSARI	4	3	3	4	1	6	50,73	396	3
397	NANGGUNG	BATU TULIS	3	2	2	4	1	6	50,73	397	3
398	MEGAMENDUNG	PASIR ANGIN	5	3	1	4	1	6	50,68	398	3
399	TAMANSARI	SUKAMANTRI	3	2	4	4	1	6	50,64	399	3
400	CIOMAS	SUKAHARJA	3	2	1	4	1	6	50,61	400	3
401	NANGGUNG	KALONG LIUD	6	4	3	4	1	6	50,61	401	3
402	PARUNG PANJANG	GINTUNG CILEJET	5	3	3	4	1	6	50,54	402	3
403	PAMIJAHAN	GUNUNG SARI	6	4	1	4	1	4	50,51	403	3
404	CIOMAS	KOTA BATU	2	3	4	4	1	6	50,35	404	3
405	CIAWI	JAMBU LUWUK	3	5	1	4	1	6	50,30	405	3
406	MEGAMENDUNG	SUKAMAHI	3	4	1	4	1	6	50,28	406	3
407	MEGAMENDUNG	KUTA	4	3	1	4	1	5	50,26	407	3
408	LEUWISADENG	KALONG I	6	5	1	4	1	6	50,21	408	3
409	RANCABUNGUR	CIMULANG	5	1	1	4	1	6	49,99	409	2
410	DRAMAGA	SUKADAMAI	5	4	3	4	1	6	49,92	410	2
411	CIJERUK	CIJERUK	5	3	1	4	1	6	49,67	411	2
412	PAMIJAHAN	GUNUNG PICUNG	5	5	1	4	1	5	49,42	412	2
413	SUKAJAYA	SUKAJAYA	5	4	2	4	1	6	49,36	413	2
414	LEUWILIANG	KARYASARI	6	5	1	4	1	5	49,35	414	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
415	SUKAJAYA	CISARUA	4	5	1	4	1	3	49,13	415	2
416	PARUNG PANJANG	CIKUDA	5	1	1	4	1	5	48,59	416	2
417	CIBUNGBULANG	CIJUJUNG	3	2	3	4	1	6	48,52	417	2
418	PARUNG PANJANG	LUMPANG	3	1	3	4	1	6	48,38	418	2
419	SUKARAJA	CIKEAS	2	3	3	4	1	6	48,31	419	2
420	NANGGUNG	HAMBARO	5	4	1	4	1	6	48,25	420	2
421	CIJERUK	CIBALUNG	6	1	1	4	1	6	48,09	421	2
422	SUKARAJA	NAGRAK	2	2	2	4	1	6	47,96	422	2
423	TAMANSARI	SUKAJAYA	3	3	2	4	1	5	47,74	423	2
424	PARUNG PANJANG	JAGABITA	5	1	1	4	1	6	47,40	424	2
425	RUMPIN	RABAK	5	1	1	4	1	4	47,11	425	2
426	SUKAMAKMUR	SUKAWANGI	6	1	1	4	1	3	46,03	426	2
427	LEUWILIANG	PURASARI	6	4	1	4	1	3	45,88	427	2
428	NANGGUNG	PANGKAL JAYA	5	4	1	4	1	6	45,55	428	2
429	CIJERUK	CIPICUNG	6	1	1	4	1	6	45,39	429	2
430	JASINGA	KALONGSAWAH	5	1	1	4	1	6	45,34	430	2
431	TAMANSARI	SUKALUYU	3	1	2	4	1	6	44,89	431	2
432	CIJERUK	CIPELANG	4	1	1	4	1	5	44,59	432	2
433	SUKAJAYA	SUKAMULIH	5	2	1	4	1	5	43,73	433	2
434	SUKAJAYA	SIPAYUNG	3	1	1	4	1	6	41,58	434	2
435	SUKAJAYA	CILEUKSA	5	3	1	3	1	4	40,59	435	2

Berdasarkan hasil analisis secara komposit, dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor tidak ada desa yang masuk ke dalam prioritas 1, sebanyak 165 desa (39,66%) termasuk dalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 2 dan 3), sedangkan 251 desa (60,34%) lainnya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6).

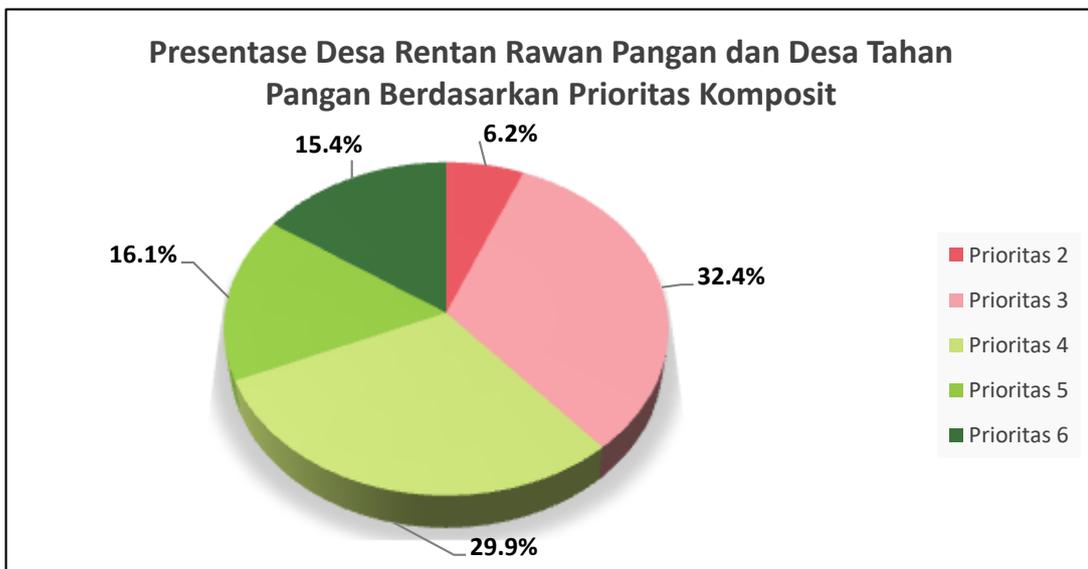
Berdasarkan hasil analisis secara komposit, dari 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor tidak ada kelurahan yang masuk ke dalam prioritas 1, tidak ada kelurahan masuk prioritas 2, sebanyak 3 kelurahan (15,8%) termasuk dalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 3), sedangkan 16 kelurahan (84,21%) lainnya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6).

Jika dirinci berdasarkan skala prioritas, tidak ada desa yang termasuk prioritas 1, sebanyak 27 desa (6,5%) masuk prioritas 2, sebanyak 138 desa (33,2%) masuk prioritas 3, sebanyak 121 desa (29,1%) masuk prioritas 4, sebanyak 65 desa (15,6%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 65 desa (15,6%) masuk prioritas 6.

Jika dirinci berdasarkan skala prioritas, tidak ada kelurahan yang termasuk prioritas 1, tidak ada kelurahan masuk prioritas 2, sebanyak 3 kelurahan (15,8%) masuk prioritas 3, sebanyak 9 kelurahan (47,4%) masuk prioritas 4, sebanyak 5 kelurahan (26,3%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 6. Sebaran jumlah desa/kelurahan secara komposit berdasarkan skala prioritas disajikan pada tabel 36 dan gambar 19.

Tabel 36 Sebaran jumlah desa/kelurahan secara komposit berdasarkan skala prioritas

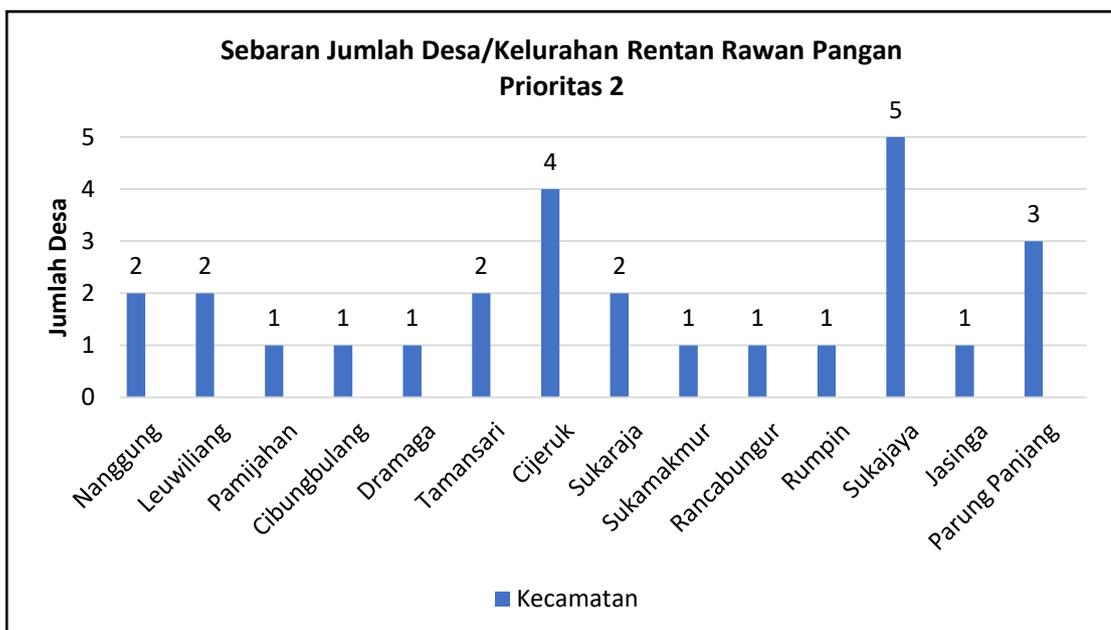
No	Prioritas	Range Indeks Komposit	Jumlah Desa	Jumlah Kel
1	Prioritas 1	≤ 40,12	0	0
2	Prioritas 2	40,12 – 50,11	27	0
3	Prioritas 3	50,11 – 56,15	138	3
4	Prioritas 4	56,15 – 62,43	121	9
5	Prioritas 5	62,43 – 67,92	65	5
6	Prioritas 6	> 67,92	65	2



Gambar 19 Presentase jumlah desa/kelurahan tahan dan rentan rawan pangan secara komposit

Dari hasil analisis secara komposit, desa/kelurahan yang paling tahan pangan adalah desa/kelurahan yang memiliki indeks komposit tertinggi, yaitu Desa Barengkok Kecamatan Jasinga dengan nilai indeks komposit sebesar 82,46 *point*. Sedangkan desa/kelurahan yang paling rentan rawan pangan adalah desa/kelurahan yang memiliki indeks komposit paling rendah, yaitu Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya dengan nilai indeks komposit sebesar 40,59 *point*.

Desa yang termasuk kategori rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) secara komposit terdapat di 27 desa/kelurahan tersebar di 14 Kecamatan, dengan desa terbanyak yaitu di Kecamatan Sukajaya sebanyak 5 desa, Kecamatan Cijeruk 4 desa, dan Kecamatan Parungpanjang 3 desa. Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan rentan rawan pangan yang termasuk prioritas 2 disajikan pada gambar 20.



Gambar 20 Sebaran jumlah desa/kelurahan prioritas 2 per kecamatan

Desa yang termasuk dalam kategori agak rentan rawan pangan (Prioritas 3) secara komposit, sebanyak 141 desa/kelurahan tersebar di 35 kecamatan sebagai berikut Kecamatan Bojonggede 3 desa, Kecamatan Caringin 3 desa, Kecamatan Ciampea 5 desa, Kecamatan Ciawi 5 desa, Kecamatan Cibinong 3 kelurahan, Kecamatan Cibungbulang 7 desa, Kecamatan Cigombong 4 desa, Kecamatan Cigudeg 4 desa, Kecamatan Cijeruk 4 desa, Kecamatan Cileungsi 1 desa, Kecamatan Ciomas 4 desa, Kecamatan Cisarua 4 desa, Kecamatan Ciseeng 3 desa, Kecamatan Citeureup 6 desa, Kecamatan Dramaga 5 desa, Kecamatan Gunungsindur 2 desa, Kecamatan Jasinga 4 desa, Kecamatan Jonggol 1 desa, Kecamatan Kemang 1 desa, Kecamatan Leuwiliang 4 desa, Kecamatan Leuwisadeng 2 desa, Kecamatan Megamendung 7 desa, Kecamatan Nanggung 4 desa, Kecamatan Pamijahan 7 desa, Kecamatan Parung 1 desa, Kecamatan Parungpanjang 3 desa, Kecamatan Rancabungur 5 desa, Kecamatan Rumpin 12 desa, Kecamatan Sukajaya 3 desa, Kecamatan Sukamakmur 5 desa, Kecamatan Sukaraja 5 desa, Kecamatan Tajurhalang 4 desa, Kecamatan Tamansari 5 desa, Kecamatan Tenjo 1 desa, Kecamatan Tenjolaya 4 desa.

Untuk tingkat Kecamatan, berdasarkan hasil analisis komposit, terdapat 16 kecamatan yang harus diberikan perhatian lebih yaitu Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tenjolaya (karena lebih dari 50% desa yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut termasuk dalam prioritas 1-3).

Sedangkan kecamatan yang seluruh desa termasuk dalam kategori tahan pangan (prioritas 4-6) berjumlah 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cariu, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Tanjungsari. Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan per kecamatan disajikan pada tabel 37.

Tabel 37 Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Babakan Madang	0	0	0	3	4	2	9
Bojonggede	0	0	3	1	3	2	9
Caringin	0	0	3	7	2	0	12
Cariu	0	0	0	0	0	10	10
Ciampea	0	0	5	8	0	0	13
Ciawi	0	0	5	4	4	0	13
Cibinong	0	0	3	6	3	1	13
Cibungbulang	0	1	7	5	2	0	15
Cigombong	0	0	4	4	0	1	9
Cigudeg	0	0	4	6	4	1	15
Cijeruk	0	4	4	1	0	0	9

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Prioritas						
	1	2	3	4	5	6	Total
Cileungsi	0	0	1	4	3	4	12
Ciomas	0	0	4	3	3	1	11
Cisarua	0	0	4	2	4	0	10
Ciseeng	0	0	3	7	0	0	10
Citeureup	0	0	6	6	1	1	14
Dramaga	0	1	5	2	0	2	10
Gunungputri	0	0	0	0	1	9	10
Gunungsindur	0	0	2	4	0	4	10
Jasinga	0	1	4	5	1	5	16
Jonggol	0	0	1	4	3	6	14
Kemang	0	0	1	5	0	3	9
Klapanunggal	0	0	0	5	1	3	9
Leuwiliang	0	2	4	2	2	1	11
Leuwisadeng	0	0	2	2	4	0	8
Megamendung	0	0	7	4	1	0	12
Nanggung	0	2	4	1	3	1	11
Pamijahan	0	1	7	3	3	1	15
Parung	0	0	1	6	2	0	9
Parungpanjang	0	3	3	1	3	1	11
Rancabungur	0	1	5	1	0	0	7
Rumpin	0	1	12	1	0	0	14
Sukajaya	0	5	3	1	1	1	11
Sukamakmur	0	1	5	3	1	0	10
Sukaraja	0	2	5	3	3	0	13
Tajurhalang	0	0	4	2	1	0	7
Tamansari	0	2	5	0	1	0	8
Tanjungsari	0	0	0	2	5	3	10
Tenjo	0	0	1	3	1	4	9
Tenjolaya	0	0	4	3	0	0	7
Total	0	27	141	130	70	67	435

5.2 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 desa antara tahun 2023-2024, berdasarkan hasil analisis komposit, jumlah desa rentan rawan pangan (prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 117 desa pada FSVA tahun 2023 menjadi 165 desa pada FSVA tahun 2024. Tidak ada desa prioritas 1 di tahun 2023 dan di tahun 2024. Desa prioritas 2 meningkat dari 18 desa (4,32%) menjadi 27 desa (6,49%). Desa prioritas 3 meningkat dari 99 desa (23,79%) menjadi 138 desa (33,17%).

Perbandingan dari 19 kelurahan antara tahun 2023 dan 2024, berdasarkan hasil analisis komposit, jumlah kelurahan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) mengalami kenaikan dari 1 kelurahan pada FSVA tahun 2023 menjadi 3 kelurahan pada FSVA tahun 2024. Tidak ada kelurahan prioritas 1 di tahun 2023 dan di tahun 2024.

Tidak ada kelurahan prioritas 2 di tahun 2023 dan di tahun 2024. Kelurahan prioritas 3 meningkat dari 1 kelurahan (5,26%) menjadi 3 kelurahan (15,78%). Sebaran desa/kelurahan per prioritas tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 38 berikut.

Tabel 38 Sebaran desa/kelurahan per prioritas 2023 - 2024

Prioritas	2023			2024		
	Desa	Kel	Total	Desa	Kel	Total
1	0	0	0	0	0	0
2	18	0	18	27	0	27
3	99	1	100	138	3	141
4	146	8	154	121	9	130
5	81	8	89	65	5	70
6	72	2	74	65	2	67
Total	416	19	435	416	19	435

5.2.1 Perubahan Prioritas Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan Tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Bogor

Perubahan tingkat prioritas desa/kelurahan dilihat berdasarkan hasil tahun 2023 dan 2024. Penurunan prioritas artinya semakin tahan pangan dan kenaikan prioritas artinya semakin rentan rawan pangan. Hasil perbandingan status ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 126 desa (30,29%) yang mengalami kenaikan 1 tingkat dan 3 desa (0,72%) yang mengalami kenaikan 2 tingkat. Terdapat 1 desa (0,24%) yang mengalami penurunan 4 tingkat, 7 desa (1,68%) yang mengalami penurunan 3 tingkat, 4 desa (0,96%) yang mengalami penurunan 2 tingkat dan 12 desa (2,88%) yang mengalami penurunan 1 tingkat. Desa yang tidak mengalami perubahan prioritas adalah sebanyak 263 desa (63,22%).

Dari 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, terdapat 5 kelurahan (26,32%) yang mengalami kenaikan 1 tingkat dan 14 kelurahan (73,68%) yang tidak mengalami perubahan prioritas. Perubahan tingkat secara rinci dapat dilihat di Tabel 39.

Tabel 39 Perubahan prioritas desa/kelurahan tahun 2023 dan 2024*)

Kecamatan	-4	-3	-2	-1	Tetap	+1	+2	Total
Babakan Madang	0	0	0	1	5	3	0	9
Bojonggede	0	0	0	0	7	2	0	9
Caringin	0	0	0	1	11	0	0	12
Cariu	0	0	0	2	8	0	0	10
Ciampea	0	0	0	0	7	6	0	13
Ciawi	0	0	1	1	9	2	0	13
Cibinong	0	0	0	0	8	5	0	13
Cibungbulang	0	0	0	0	5	10	0	15
Cigombong	0	0	0	0	8	1	0	9
Cigudeg	0	0	0	0	6	9	0	15
Cijeruk	0	0	0	0	7	2	0	9
Cileungsi	0	0	0	0	8	4	0	12
Ciomas	0	0	0	0	10	1	0	11

Kecamatan	-4	-3	-2	-1	Tetap	+1	+2	Total
Cisarua	0	0	1	0	8	1	0	10
Ciseeng	0	0	0	0	9	1	0	10
Citeureup	0	0	0	0	9	5	0	14
Dramaga	0	0	0	0	6	4	0	10
Gunungputri	0	0	0	0	10	0	0	10
Gunungsindur	0	0	0	0	7	3	0	10
Jasinga	1	0	0	1	10	4	0	16
Jonggol	0	0	0	2	7	3	2	14
Kemang	0	0	0	0	5	4	0	9
Klapanunggal	0	0	0	0	5	4	0	9
Leuwiliang	0	0	1	0	7	3	0	11
Leuwisadeng	0	2	0	1	5	0	0	8
Megamendung	0	1	0	1	8	2	0	12
Nanggung	0	0	0	0	9	2	0	11
Pamijahan	0	3	0	0	7	5	0	15
Parung	0	0	0	0	4	5	0	9
Parungpanjang	0	0	1	0	4	6	0	11
Rancabungur	0	0	0	0	4	3	0	7
Rumpin	0	0	0	0	10	4	0	14
Sukajaya	0	1	0	0	3	6	1	11
Sukamakmur	0	0	0	0	5	5	0	10
Sukaraja	0	0	0	1	7	5	0	13
Tajurhalang	0	0	0	0	5	2	0	7
Tamansari	0	0	0	0	7	1	0	8
Tanjungsari	0	0	0	0	7	3	0	10
Tenjo	0	0	0	1	5	3	0	9
Tenjolaya	0	0	0	0	5	2	0	7
Total	1	7	4	12	277	131	3	435

Keterangan: *) jumlah desa/kelurahan naik/turun prioritas

5.3 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Desa/kelurahan sangat rentan terhadap kerawanan pangan (baik Prioritas 1, Prioritas 2 maupun Prioritas 3) berdasarkan analisa komposit secara umum disebabkan oleh:

- 1) Tingginya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
- 2) Rendahnya rasio sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; dan
- 3) Tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memahami keadaan wilayah desa/kelurahan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut atau menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di Kabupaten Bogor diprioritaskan pada:

- a. Desa/kelurahan prioritas 1-3 sejumlah 168 desa/kelurahan dengan rincian tidak ada desa/kelurahan yang termasuk Prioritas 1, Prioritas 2 sebanyak 27 desa/kelurahan dan Prioritas 3 sebanyak 141 desa/kelurahan;
- b. Desa/kelurahan yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain; dan
- c. Desa/kelurahan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa/kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 21 Kerangka intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan

Dalam membangun wilayah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan direkomendasikan program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan, antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mendukung aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
2. Penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan, termasuk dalam penanganan *stunting* yang dimulai dari target utama yang berisiko, (calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta Baduta yang mengalami *underweight* dan *wasting*) dialokasikan paling sedikit 20%;
3. Peningkatan akses dan/atau kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan; dan
4. Fasilitasi kajian terkait peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

6.1 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Selama kurun waktu tahun 2019-2023 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor mencapai rata-rata -8,32% per tahun sebagaimana disajikan pada tabel 39. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bogor bertambah sebanyak 76.772 jiwa dibandingkan tahun 2022 atau bertambah sebanyak 1,37%.

Secara umum penambahan penduduk Kabupaten Bogor sebagai efek Pandemi *Corona Virus Disease 19* yang sudah mulai terkendali di tahun 2021 sehingga mengakibatkan kondisi seperti semula dan mempengaruhi pergerakan penduduk. Selain itu penambahan penduduk disebabkan karena:

- a. Pergerakan penduduk di wilayah konsentrasi padat usaha terutama industri dan perdagangan;
- b. Kawasan kampus dan Kawasan Pendidikan yang sebelumnya menggunakan sistem pembelajaran daring berubah menjadi luring (pertemuan langsung) sehingga umumnya siswa, mahasiswa dan santri kembali ke sekolah/kampusnya; dan
- c. Sebagian besar penghuni yang sebelumnya tinggal di tempat domisili utamanya saat pandemi dan bekerja secara *Work From Home* (WFH), sudah kembali ke wilayah Kabupaten Bogor karena mulai bekerja secara *Work From Office* (WFO).

Tabel 40 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2019	5.965.410	2,13
2020	5.427.068	-9,92
2021	5.489.536	1,14
2022	5.566.308	1,22
2023	5.627.021	1,27
Rata-rata per tahun		-8,32

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Kebijakan Kabupaten Bogor mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui Peningkatan produksi dengan beberapa cara, antara lain melalui:
 - a. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian: Membuka lahan baru untuk pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui penggunaan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi yang baik, penggunaan pupuk organik, dan varietas unggul;
 - b. Diversifikasi Produk Pertanian: Mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam;
 - c. Pemberdayaan Petani: Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik budidaya yang baik, manajemen usaha tani, dan akses pasar;
 - d. Perlindungan Tanaman: Melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu untuk mengurangi kerugian produksi;
 - e. Jalan Usaha Tani: Membangun dan memperbaiki jalan usaha tani untuk memudahkan akses petani ke pasar;
 - f. Penyediaan Gudang: Membangun gudang penyimpanan hasil pertanian untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen;
 - g. Program Pekarangan Pangan Lestari (PPL): Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan;
 - h. Pemberian bantuan Benih dan Pupuk: Memberikan bantuan benih dan pupuk kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan di tingkat rumah tangga;
 - i. Konservasi Lahan: Melakukan konservasi lahan untuk mencegah terjadinya erosi dan degradasi lahan;
 - j. Pengelolaan Air: Melakukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan air bagi pertanian;
 - k. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur produksi pertanian;
 - l. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur produksi perikanan;
 - m. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - n. Pengendalian penyakit hewan dan zoonosis;
 - o. Peningkatan produksi kopi terbesar di Jawa Barat; dan
 - p. Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
2. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan penguatan lumbung pangan masyarakat;
3. Peningkatan infrastruktur penyediaan pangan, antara lain melalui:
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi pasar dengan cara memperbaiki dan memodernisasi pasar tradisional untuk menjamin ketersediaan pangan segar dan berkualitas serta membangun pasar modern di lokasi strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;

- b. Pemanfaatan teknologi *e-commerce* untuk mempermudah distribusi pangan dari produsen ke konsumen; dan
 - c. Pembangunan dan optimalisasi kios pangan.
4. Kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produksi, antara lain melalui:
 - a. Koperasi Petani: Memperkuat peran koperasi petani dalam pengadaan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan pembiayaan;
 - b. Perguruan Tinggi: Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian; dan
 - c. Swasta: Melibatkan swasta dalam investasi di sektor pertanian, seperti pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian dan perusahaan distribusi pangan.
 5. Efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan, antara lain melalui:
 - a. Penanganan *food loss* dan *food waste* di sepanjang rantai pasok pangan untuk peningkatan ketersediaan pangan; dan
 - b. Alih teknologi untuk efisiensi sumber daya.
 6. Pengurangan Ketimpangan, antara lain melalui:
 - a. Reformasi Agraria: Melakukan reformasi agraria untuk memberikan akses lahan kepada masyarakat miskin; dan
 - b. Penguatan Koperasi: Memperkuat peran koperasi sebagai wadah ekonomi Masyarakat.
 7. Penggalakkan gerakan beli beras petani Bogor; dan
 8. Peningkatan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting.

6.2 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Kebijakan Kabupaten Bogor mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan strategi peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara:

1. Peningkatan kualitas keluarga dengan arah kebijakan meningkatkan ekonomi keluarga sejahtera dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga
2. Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat dengan arah kebijakan Membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa)
3. Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kapasitas dan peluang kerja,
 - b. Pemanfaatan *Career Center*,
 - c. Pemanfaatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Ketenagakerjaan,
 - d. Peningkatan kemitraan ketenagakerjaan, dan
 - e. Pengembangan potensi wisata di Kabupaten Bogor untuk menciptakan lapangan kerja baru.

4. Peningkatan kualitas pelaku usaha dengan arah kebijakan, antara lain melalui:
 - a. Sertifikasi pelaku usaha;
 - b. Peningkatan jumlah koperasi aktif;
 - c. Optimalisasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha;
 - d. Peningkatan kualitas metrologi legal;
 - e. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan perlindungan petani termasuk petani milenial;
 - f. Fasilitasi sarana prasarana usaha pertanian;
 - g. Optimalisasi dan pengembangan BUMDes atau BUMDes Bersama; dan
 - h. Pengembangan Ekosistem Usaha Ekonomi Kreatif.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara:
 - a. Pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi;
 - c. Kesehatan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.
6. Penyediaan Infrastruktur Dasar, di antaranya:
 - a. Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan untuk memudahkan akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik;
 - b. Listrik: Memperluas jaringan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
7. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
8. Peningkatan pemberian perlindungan dan jaminan sosial dengan arah kebijakan meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

6.3 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kabupaten Bogor, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi dapat menyebabkan penurunan kapasitas intelektual. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan kemudian secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah

tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan, pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya. Stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. (sumber World Bank (2014). *Better Growth through Improved Sanitation and Hygiene Practices*).

Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi.

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun;
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk;
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan an perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka;

- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi 3 (tiga) penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- 1) Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*Sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 (empat) kali selama periode kehamilan;
- 2) Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: Inisiasi Menyusui Dini (IMD) segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 (enam) bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit;
- 3) Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat;
- 4) Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga;
- 5) Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan;
- 6) Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika tersedia alokasi anggaran).

- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan), mencakup:

- 1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
- 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- 3) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- 4) Peningkatan akses pangan bergizi; dan
- 5) Sasaran intervensi tidak langsung yaitu keluarga dan masyarakat.

Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. (sumber Bappenas, 2018 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota).

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat terhadap biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Investasi di bidang gizi dapat dilaksanakan antara lain melalui:

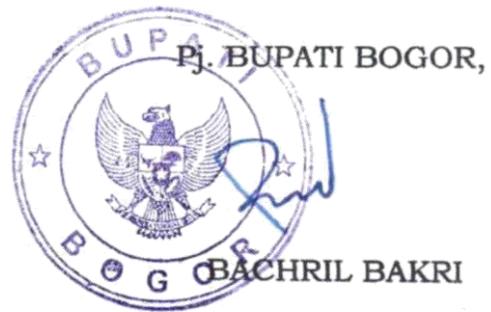
- a. Penyusunan dan implementasi rencana aksi pangan dan gizi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) sebagai panduan dalam mengintegrasikan pembangunan pangan dan gizi, dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, yang selanjutnya diikuti penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG;
- b. Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
- c. Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng);

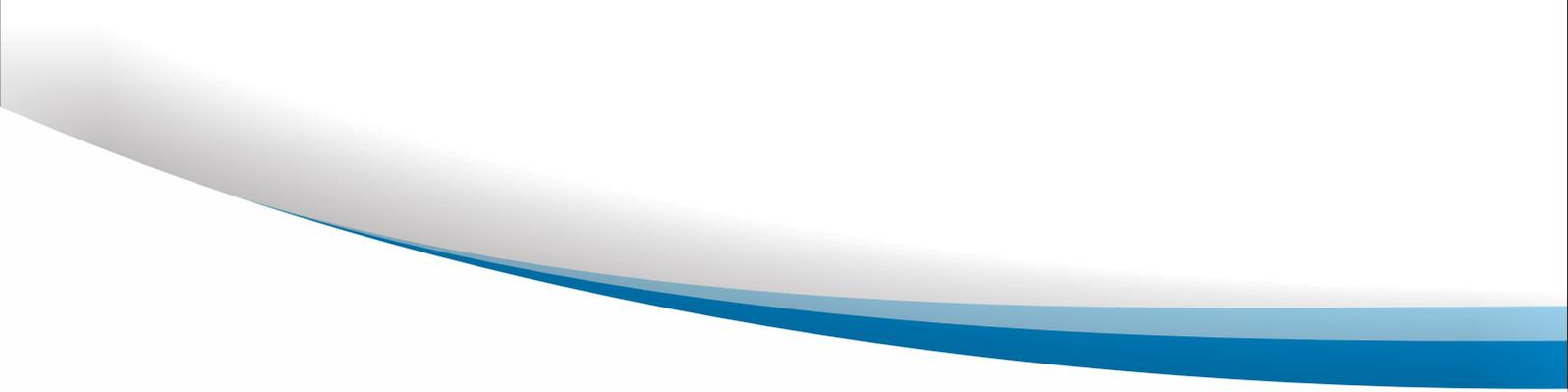
- d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- e. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan), mencakup:
 - (1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - (2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - (3) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan
 - (4) Peningkatan akses pangan bergizi.

Kebijakan Kabupaten Bogor mengenai peningkatan kualitas kesehatan bertujuan agar terwujudnya masyarakat Bogor sehat dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan dengan strategi peningkatan upaya kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan; dan
 - c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan.
2. Penurunan prevalensi *Stunting* dan peningkatan gizi masyarakat melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting dan Ibu Hamil KEK (Gotasmil); PMT lokal; intervensi sensitif dan spesifik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
3. Pengelolaan Sumber Daya Air yang lebih baik, antara lain melalui:
 - a. Konservasi Sumber Air: Melakukan upaya konservasi sumber air seperti reboisasi, pembuatan sumur resapan, dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS);
 - b. Pengelolaan Air Limbah: Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dan industri agar tidak mencemari sumber air;
 - c. Pemantauan Kualitas Air: Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala untuk memastikan keamanan dan kelayakan air untuk dikonsumsi.
4. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, antara lain melalui:
 - a. Perluasan Jaringan Perpipaan: Memperluas jaringan perpipaan air bersih untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani;
 - b. Pembangunan Sumur Bor: Membangun sumur bor di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan perpipaan;
 - c. Pembangunan Waduk dan Embung: Membangun waduk dan embung untuk menampung air hujan dan sebagai cadangan air saat musim kemarau.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air bersih yang lebih baik, antara lain melalui:
 - a. Konservasi Sumber Air: Melakukan upaya konservasi sumber air seperti reboisasi, pembuatan sumur resapan, dan perlindungan Daerah Aliran Sungai;

- b. Pengelolaan Air Limbah: Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dan industri agar tidak mencemari sumber air; dan
 - c. Pemantauan Kualitas Air: Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala untuk memastikan keamanan dan kelayakan air untuk dikonsumsi.
6. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, antara lain melalui:
- a. Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan Jaringan Perpipaan;
 - b. Pembangunan hidran umum: Membangun hidran umum di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan perpipaan;
 - c. Pembangunan Waduk dan Embung: Membangun waduk dan embung untuk menampung air hujan dan sebagai cadangan air saat musim kemarau; dan
 - d. Penguatan kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum (KPSPAM) melalui sosialisasi pelatihan dan pendampingan.
7. Efisiensi Penggunaan Air, antara lain melalui:
- a. Sosialisasi Penghematan Air: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan cara-cara menghemat air dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Penerapan Teknologi Hemat Air: Mendorong penggunaan teknologi hemat air pada bangunan-bangunan baru dan fasilitas umum;
 - c. Tarif Air Progresif: Menerapkan tarif air progresif untuk mendorong masyarakat lebih hemat dalam penggunaan air; dan
 - d. Panen air hujan.
- Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dan cara mengolah makanan yang sehat.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Segar III Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bogor

Telp/Fax : (021) 879 17425

Laman : dkpangankab.bogor@gmail.com

Website : dkp.bogorkab.go.id

Instagram : [dkp_kabbogor](https://www.instagram.com/dkp_kabbogor)